



RENCANA KERJA TAHUN 2022

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mengizinkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 sehingga dapat tersusun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan tetap memperhatikan issu-issu kehutanan yang berkembang melalui Musyawarah Forum SKPD Kehutanan Provinsi dan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022.

Terdapat empat sasaran pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2022 yaitu meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan, meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan, meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumberdaya alam hayati, terjadinya fungsi dan legalitas kawasan hutan, sehingga diharapkan rencana kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen penganggaran (Rencana Kerja dan Anggaran) pada tahun 2022 sehingga sinkronisasi dan konsistensi perencanaan terwujud

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan, sehingga Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022, tersusun dengan baik.

Makassar, 2021

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi sulawesi selatan

Ir. H. ANDI PARENRENGI, M.P
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP.19631231 199703 1020

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Diagram	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II.....	6
2.1 Evaluasi Renja Dinas Kehutanan Prov. Sulsel Triwulan II	6
2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	30
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	31
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	46
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional	46
3.1.1 Tujuan dan sasaran pembangunan daerah	46
3.1.2 Prioritas dan sasaran pembangunan nasional 2022	47
3.2 Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022	48
3.3 Arah dan Kebijakan Daerah Tahun 2021	53
3.3.1 Sasaran Pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.....	54
3.4 Program dan Kegiatan.....	56
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan	61
BAB V Penutup	92
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan	92
5.2 Rencana tindak lanjut	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target dan realisasi tujuan dan sasaran tahun 2020	7
Tabel 2	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra perangkat daerah Sampai dengan tahun 2020	8
Tabel 3	Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Prov. Sulsel.....	40
Tabel 4	Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022	48
Tabel 5	Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2022	62
Tabel 6	Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022	73
Tabel 7	Target kinerja Utama Daerah tahun 2022	75
Tabel 8	Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022	76
Tabel 9	Keterkaitan RPJMD dan Rencana Strategis	77
Tabel 10	Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 dan tahun 2022	77
Tabel 11	Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan	84
Tabel 12	Prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang mendukung prioritas provinsi tahun 2022.....	94
Tabel 13	Prioritas perangkat daerah	99

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Perkembangan perhutanan sosial	41
Diagram 2	Kelompok tani hutan	42
Diagram 3	Kerusakan kawasan hutan	43
Diagram 4	Rehabilitasi Hutan dan Lahan.....	44
Diagram 5	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan.....	45
Diagram 6	Luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah identik dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat dan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dalam aspek pendapatan kesempatan kerja, akses pengambilan kebijakan. Mewujudkan hal tersebut diperlukan perencanaan yang logis, rasional, komprehensif dan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Perencanaan yang sistematis akan memberi acuan yang jelas dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan strategis tahunan sektor kehutanan pada tahun 2022, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan kehutanan. Dokumen rencana kerja merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 15 dan disusun melalui koordinasi, sinergitas dengan pemangku kepentingan untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan hutan yang lestari dan berkesinambungan.

Rencana Kerja tahun 2022 merupakan penjabaran tahun keempat Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023. Beberapa program strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bagian dalam pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2013, dengan demikian dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

RKPD tahun 2022 mengusung tema “Inovasi pemanfaatan potensi dan sumberdaya alam untuk kebangkitan ekonomi”. Tema tersebut selaras dengan tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan. Pengelolaan kawasan hutan memiliki peluang yang besar untuk kebangkitan ekonomi Sulawesi Selatan di masa pandemi Covid-19, terutama dalam ekonomi mikro berbasis pemberdayaan kelompok tani hutan, tentunya pengelolaan hutan tersebut



tetap memperhatikan azas kelestarian dan berkesinambungan. Tema RKPD tahun 2022 juga mendukung sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Salah satu target RKPD Sulawesi Selatan pada tahun 2022 adalah pertumbuhan ekonomi 4,62-5,98. Target ini menjadi bagian dalam pembangunan kehutanan Sulawesi Selatan tahun 2022 melalui kontribusi sektor kehutanan pada PDRB Sulawesi Selatan sebesar 0,07 %, yang turut mendukung kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB Nasional sebesar 109 trilyun pada tahun 2022 (*Renstra KLHK 2020-2024*). Upaya yang akan ditempuh dengan mengoptimalkan produksi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, serta jasa lingkungan (ekowisata).

Pembangunan Sulawesi Selatan juga mengedepankan kelestarian lingkungan, dengan menargetkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 77,82 lebih besar dari target nasional sebesar 69,22 (*Renstra KLHK 2020-2024*). Pencapaiannya menjadi bagian pembangunan kehutanan pada tahun 2022 melalui peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH) sebesar 58,66 dengan terus melakukan kolaborasi antar stakeholder dalam pemulihan hutan dan lahan serta perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.

Oleh karena itu, Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2022 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dan menjadi pedomam dalam penyusuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubatan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam negeri Nomir 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 tahun 2011 tentang Tata Cata Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan



15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 92 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
17. Instruksi Preside Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
18. **Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022**
19. **Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun tentang Pengesahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2022**

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 disusun dengan maksud untuk sebagai pedoman dan acuan sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam rangka mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Tujuan
 - a. Menetapkan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai melalui APBD Propinsi maupun melalui DAK tahun 2022
 - b. Acuan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022
 - c. Sebagai tolok ukur penilaian/evaluasi Kinerja Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja



Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja perangkat daerah, program dan kegiatan

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat

Bab V. Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan rencana kerja serta kaidah pelaksanaan rencana kerja, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Evaluasi rencana kerja merupakan bentuk pertimbangan dan arahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang sekaligus penentuan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan sebagai berikut :

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020

Sesuai dengan rencana strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan yang akan dicapai meliputi :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya hutan
 - Sasaran 1.1 : Meningkatnya pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu
 - Sasaran 1.2 : Meningkatnya akses masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial
2. Tujuan 2 : Meningkatkan daya dukung dan daya tampung hutan dan lahan
 - Sasaran 2.1 : Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan
 - Sasaran 2.2 : Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan

Target dan realisasi tujuan dan sasaran pada tahun 2020 sesuai rencana kerja tahun 2020, tersaji pada tabel berikut :



Tabel 1
Target dan realisasi tujuan dan sasaran tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020
1. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan		Persentase kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan	0,06	0,06
	1.1 Meningkatnya pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu	Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	12.000 ha	26.151,58 ha
	1.2 Meningkatnya akses masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial	Persentase wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi	3,51 %	9,05 %
2. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung hutan dan lahan		Indeks kualitas tutupan lahan	58,62	58,62
	2.1 Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap total lahan kritis Prov. Sulsel	7,93 %	7,57 %
	2.2 Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan	Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	64,67 %	68,20
		Persentase kerusakan kawasan hutan	1,38 %	0,70 %
		Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	16 KPH	16 KPH

Capaian Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2020 dilaksanakan 9 (Sembilan) program dan 76 (tujuh puluh enam) kegiatan, dengan uraian sebagaimana pada tabel berikut ;

**Tabel 2****Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pilihan									
	Bidang Kehutanan									
20	Program Penatan Hutan dan Pemanfaatan Hutan (Prioritas)	% Luas kawasan hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya (Prioritas)	64,67 %	67,05 %	64,67 %	68,20 %	105,46 %	-	68,20 %	105,46 %
		Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	2.105 ton	4.852,26 ton	339,60 ton	48.491,08 ton	14.278 ton	-	53.342,31	2.534,12 %
		Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan	477.175,12 m ³	61.578,01	76.947,18 m ³	1.145.368,93 m ³	1.488,51 m ³	-	1.209.946,94	252,94 %
	1	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Jeneberang I	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100 %		100 %
	2	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Jeneberang II	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100 %		100 %
	3	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Selayar	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	-	0 %		0 %
	4	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Cenrana	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	-	0 %		0 %
	5	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Walanae	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	-	0 %		0 %
	6	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Bulusaraung	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100 %		100 %
	7	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Ajatappareng	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100 %		100 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	8	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Bila	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	-	0 %		0 lokasi	0 %
	9	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Sawitto	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100 %		1 lokasi	100 %
	10	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Saddang I	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	-	0 %		0 lokasi	0 %
	11	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Saddang II	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100 %		1 lokasi	100 %
	12	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Latimojong	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100 %		1 lokasi	100 %
	13	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Rongkong	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	-	0 %		0 lokasi	0 %
	14	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Kalaena	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100 %		1 lokasi	100 %
	15	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Larona Malili	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	-	0 %		0 lokasi	0 %
	16	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Mata Allo	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	-	0 %		0 lokasi	0 %
	17	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Jeneberang I	Jumlah patok batas blok dan petak	500 buah	0 buah	250 buah	-	0 %		0 buah	0 %
	18	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Jeneberang II	Jumlah patok batas blok dan petak	500 buah	0 buah	250 buah	-	0 %		0 buah	0 %
	19	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Selayar	Jumlah patok batas blok dan petak	500 buah	0 buah	250 buah	-	0 %		0 buah	0 %
	20	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Cenrana	Jumlah patok batas blok dan petak	374 buah	0 buah	187 buah	-	0 %		0 buah	0 %
	21	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Walanae	Jumlah patok batas blok dan petak	374 buah	0 buah	187 buah	-	0 %		0 buah	0 %
	22	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Bulusaraung	Jumlah patok batas blok dan petak	374 buah	0 buah	187 buah	-	0 %		0 buah	0 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	23	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Ajatappareng	Jumlah patok batas blok dan petak	250 buah	0 buah	125 buah	-	0 %		0 buah
	24	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Bila	Jumlah patok batas blok dan petak	374 buah	0 buah	187 buah	-	0 %		0 buah
	25	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Sawitto	Jumlah patok batas blok dan petak	250 buah	0 buah	125 buah	-	0 %		0 buah
	26	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Saddang I	Jumlah patok batas blok dan petak	374 buah	0 buah	187 buah	-	0 %		0 buah
	27	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Saddang II	Jumlah patok batas blok dan petak	374 buah	0 buah	187 buah	-	0 %		0 buah
	28	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Latimojong	Jumlah patok batas blok dan petak	374 buah	0 buah	187 buah	-	0 %		0 buah
	29	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Rongkong	Jumlah patok batas blok dan petak	500 buah	0 buah	250 buah	-	0 %		0 buah
	30	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Kalaena	Jumlah patok batas blok dan petak	500 buah	0 buah	250 buah	-	0 %		0 buah
	31	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Larona Malili	Jumlah patok batas blok dan petak	374 buah	0 buah	187 buah	-	0 %		0 buah
	32	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Mata Allo	Jumlah patok batas blok dan petak	374 buah	0 buah	187 buah	-	0 %		0 buah
	33	Review perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Jumlah kabupaten/kota pengusul	4 kab/kota	0 kab/kota	1 kab/kota	-	0 %		0 kab/kota
	34	Pembinaan dan pengawasan GANIS dan WASGANIS	Jumlah GANIS dan WASGANIS yang dibina	40 orang	0 orang	40 orang	-	0 %		0 orang
	35	Pembinaan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, IUPHHK, IPHHK, IPK	135 izin	17 izin	30 izin	-	0 %		17 izin
	36	Penyusunan bisnis plan	Jumlah buku bisnis plan	16 dokumen	0 dokumen	16 dokumen	-	0 %		0 dokumen
	37	Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil hutan	Jumlah industri yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi	300 industri	85 industri	60 industri	-	0 %		85 industri
	38	Monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan PSDH/DR	Jumlah data perhitungan iuran kehutanan	10 laporan	2 laporan	2 laporan	-	0 %		2 laporan
			Jumlah pemegang izin yang wajib bayar PSDH/DR	300 izin	152 izin	60 izin	-	0 %		152 izin
21	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Cakupan ketersediaan jumlah bibit	5.000.000 bibit	864.612 bibit	1.000.000 bibit	145.786 bibit	14,58 %		1.010.398 bibit	20,21 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi (Prioritas)	5.000 ha	20.508 ha	1.000 ha	510 ha	51,0 %		21.018 ha	420,36 %	
		Indeks kualitas tutupan lahan (Prioritas)	58,68	54,94	58,62	54,94	93,72 %		54,94	93,72 %	
21	1	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Jeneberang I	Jumlah unit persemaian	1 unit	0 unit	1 unit	-	0 %		0 unit	0 %
	2	Pembuatan persemaian di wilayah KPH jeneberang II	Jumlah unit persemaian	1 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100 %		1 unit	100 %
	3	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Selayar	Jumlah unit persemaian	1 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100 %		1 unit	100 %
	4	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Centrana	Jumlah unit persemaian	1 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100 %		1 unit	100 %
	5	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Walanae	Jumlah unit persemaian	1 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100 %		1 unit	100 %
	6	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Bulusaraung	Jumlah unit persemaian	1 unit	0 unit	1 unit	-	0 %		0 unit	0 %
	7	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Ajatappareng	Jumlah unit persemaian	1 unit	0 unit	1 unit	-	0 %		0 unit	0 %
	8	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Bila	Jumlah unit persemaian	1 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100 %		1 unit	100 %
	9	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Sawitto	Jumlah unit persemaian	1 unit	0 unit	1 unit	-	0 %		0 unit	0 %
	10	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Saddang I	Jumlah unit persemaian	1 unit	0 unit	1 unit	-	0 %		0 unit	0 %
	11	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Saddang II	Jumlah unit persemaian	1 unit	0 unit	1 unit	-	0 %		0 unit	0 %
	12	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Latimojong	Jumlah unit persemaian	1 unit	0 unit	1 unit	-	0 %		0 unit	0 %
	13	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Rongkong	Jumlah unit persemaian	1 unit	0 unit	1 unit	-	0 %		0 unit	0 %
	14	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Kalaena	Jumlah unit persemaian	1 unit	0 unit	1 unit	-	0 %		0 unit	0 %
	15	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Larona Malili	Jumlah unit persemaian	1 unit	0 unit	1 unit	-	0 %		0 unit	0 %
	16	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Mata Allo	Jumlah unit persemaian	1 unit	0 unit	1 unit	-	0 %		0 unit	0 %
	17	Jumlah unit dam penahan	28 unit	20 unit	7 unit	-	0 %		20 unit	71,43 %	



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK VI dan VII / KPH Jeneberang I	Jumlah unit gully plug	24 unit	13 unit	6 unit	-	0 %		13 unit	54,16 %
		Jumlah unit sumur resapan	24 unit	0 unit	6 unit	-	0 %		0 unit	0 %
	18 Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK VII dan VIII / KPH Jeneberang II	Jumlah unit dam penahan	40 unit	16 unit	6 unit	-	0 %		16 unit	40,00 %
		Jumlah unit gully plug	24 unit	0 unit	6 unit	-	0 %		0 unit	0 %
		Jumlah unit sumur resapan	24 unit	0 unit	6 unit	-	0 %		0 unit	0 %
	19 Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK VIII / KPH Selayar	Jumlah unit dam penahan	8 unit	0 unit	2 unit	-	0 %		0 unit	0 %
		Jumlah unit gully plug	12 unit	0 unit	3 unit	-	0 %		0 unit	0 %
		Jumlah unit sumur resapan	12 unit	0 unit	3 unit	-	0 %		0 unit	0 %
	20 Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK V / KPH Cenranra	Jumlah unit dam penahan	11 unit	3 unit	2 unit	-	0 %		3 unit	27,27 %
		Jumlah unit gully plug	18 unit	6 unit	3 unit	-	0 %		6 unit	75,00 %
		Jumlah unit sumur resapan	12 unit	0 unit	3 unit	-	0 %		0 unit	0 %
	21 Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK V / KPH Walanae	Jumlah unit dam penahan	18 unit	2 unit	4 unit	-	0 %		2 unit	11,11 %
		Jumlah unit gully plug	25 unit	1 unit	6 unit	-	0 %		1 unit	4,00 %
		Jumlah unit sumur resapan	24 unit	0 unit	6 unit	-	0 %		0 unit	0 %
	22 Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK I / KPH Bulusaraung	Jumlah unit dam penahan	18 unit	2 unit	4 unit	-	0 %		2 unit	11,11 %
		Jumlah unit gully plug	35 unit	11 unit	6 unit	-	0 %		11 unit	31,42 %
		Jumlah unit sumur resapan	24 unit	0 unit	6 unit	-	0 %		0 unit	0 %
	23 Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK II / KPH Ajatappareng	Jumlah unit dam penahan	9 unit	1 unit	2 unit	-	0 %		1 unit	11,11 %
		Jumlah unit gully plug	13 unit	1 unit	3 unit	-	0 %		1 unit	7,69 %
		Jumlah unit sumur resapan	12 unit	0 unit	3 unit	-	0 %		0 unit	0 %
	24 Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK II / KPH Bila	Jumlah unit dam penahan	26 unit	2 unit	4 unit	-	0 %		2 unit	7,69 %
		Jumlah unit gully plug	24 unit	0 unit	6 unit	-	0 %		0 unit	0 %
		Jumlah unit sumur resapan	24 unit	0 unit	6 unit	-	0 %		0 unit	0 %
	25 Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK II / KPH Sawitto	Jumlah unit dam penahan	10 unit	2 unit	2 unit	-	0 %		2 unit	20,00 %
		Jumlah unit gully plug	12 unit	0 unit	3 unit	-	0 %		0 unit	0 %
		Jumlah unit sumur resapan	12 unit	0 unit	3 unit	-	0 %		0 unit	0 %
	26 Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK III / KPH Saddang I	Jumlah unit dam penahan	16 unit	4 unit	3 unit	-	0 %		4 unit	25,00 %
		Jumlah unit gully plug	20 unit	8 unit	3 unit	-	0 %		8 unit	40,00 %
		Jumlah unit sumur resapan	12 unit	0 unit	3 unit	-	0 %		0 unit	0 %
	27 Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK III / KPH Saddang II	Jumlah unit dam penahan	14 unit	2 unit	3 unit	-	0 %		2 unit	14,28 %
		Jumlah unit gully plug	15 unit	3 unit	3 unit	-	0 %		3 unit	20,00 %
		Jumlah unit sumur resapan	12 unit	0 unit	3 unit	-	0 %		0 unit	0 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
28	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK IV / KPH Latimojong	Jumlah unit dam penahan	15 unit	3 unit	4 unit	-	0 %		3 unit	20,00 %
		Jumlah unit gully plug	30 unit	6 unit	6 unit	-	0 %		6 unit	20,00 %
		Jumlah unit sumur resapan	24 unit	0 unit	6 unit	-	0 %		0 unit	0 %
29	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK IV / KPH Rongkong	Jumlah unit dam penahan	13 unit	1 unit	3 unit	-	0 %		1 unit	7,69 %
		Jumlah unit gully plug	14 unit	2 unit	3 unit	-	0 %		2 unit	14,28 %
		Jumlah unit sumur resapan	12 unit	0 unit	3 unit	-	0 %		0 unit	0 %
30	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK IV / KPH Kalaena	Jumlah unit dam penahan	8 unit	0 unit	2 unit	-	0 %		0 unit	0 %
		Jumlah unit gully plug	12 unit	0 unit	3 unit	-	0 %		0 unit	0 %
		Jumlah unit sumur resapan	12 unit	0 unit	3 unit	-	0 %		0 unit	0 %
31	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK IV / KPH Larona Malili	Jumlah unit dam penahan	9 unit	1 unit	2 unit	-	0 %		1 unit	11,11 %
		Jumlah unit gully plug	12 unit	0 unit	3 unit	-	0 %		0 unit	0 %
		Jumlah unit sumur resapan	12 unit	0 unit	3 unit	-	0 %		0 unit	0 %
32	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK III / KPH Mata Allo	Jumlah unit dam penahan	12 unit	4 unit	3 unit	-	0 %		4 unit	33,33 %
		Jumlah unit gully plug	21 unit	9 unit	3 unit	-	0 %		9 unit	42,85 %
		Jumlah unit sumur resapan	12 unit	0 unit	3 unit	-	0 %		0 unit	0 %
33	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada Wilayah CDK VI dan CDK VII / Wilayah KPH Jeneberang I	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	116 ha	0 ha	50 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman bambu	105 ha	40 ha	40 ha	-	0 %		40 ha	38,09 %
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	400 ha	0 ha	150 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman mangrove	62 ha	50 ha	3 ha	-	0 %		50 ha	80,64 %
		Luas pembuatan tanaman bambu	20 ha	0 ha	5 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	230 ha	150 ha	20 ha	-	0 %		150 ha	65,21
34	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK VII dan VIII / KPH Jeneberang II	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	36 ha	0 ha	10 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman bambu	95 ha	40 ha	40 ha	-	0 %		40 ha	42,10 %
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	420 ha	60 ha	160 ha	-	0 %		60 ha	14,28 %
		Luas pembuatan tanaman mangrove	23 ha	10 ha	4 ha	-	0 %		10 ha	43,47 %
		Luas pembuatan tanaman bambu	12 ha	0 ha	3 ha	-	0 %		0 ha	0 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	180 ha	100 ha	20 ha	-	0 %		100 ha	55,55 %
35	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK VIII / KPH Selayar	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	15 ha	0 ha	0 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman bambu	15 ha	0 ha	0 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	160 ha	0 ha	30 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman mangrove	12 ha	0 ha	3 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman bambu	12 ha	0 ha	3 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	110 ha	30 ha	20 ha	-	0 %		30 ha	27,27 %
36	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK V / KPH Cenrana	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	15 ha	0 ha	0 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman bambu	20 ha	0 ha	10 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	200 ha	50 ha	50 ha	-	0 %		50 ha	25,00 %
		Luas pembuatan tanaman mangrove	12 ha	0 ha	3 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman bambu	10 ha	10 ha	0 ha	-	0 %		10 ha	100,00 %
		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	80 ha	0 ha	20 ha	-	0 %		0 ha	0 %
37	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK V / KPH Walanae	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	15 ha	0 ha	0 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman bambu	15 ha	0 ha	0 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	200 ha	50 ha	50 ha	-	0 %		50 ha	25,00 %
		Luas pembuatan tanaman mangrove	12 ha	0 ha	3 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman bambu	12 ha	0 ha	3 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	80 ha	0 ha	20 ha	-	0 %		0 ha	0 %
38		Luas pemeliharaan tanaman mangrove	121 ha	0 ha	53 ha	-	0 %		0 ha	0 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK I / KPH Bulusaraung	Luas pemeliharaan tanaman bambu	155 ha	25 ha	70 ha	-	0 %		25 ha	16,12 %
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	100 ha	0 ha	0 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman mangrove	66 ha	53 ha	3 ha	-	0 %		53 ha	80,30 %
		Luas pembuatan tanaman bambu	57 ha	45 ha	3 ha	-	0 %		45 ha	78,94 %
		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	80 ha	0 ha	20 ha	-	0 %		0 ha	0 %
	39 Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK II / KPH Ajatappareng	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	18 ha	0 ha	3 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman bambu	9 ha	0 ha	0 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	202 ha	0 ha	25 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman mangrove	12 ha	0 ha	3 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman bambu	9 ha	0 ha	0 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	159 ha	25 ha	28 ha	-	0 %		25 ha	15,72 %
	40 Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK II / KPH Bila	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	15 ha	0 ha	0 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman bambu	20 ha	0 ha	10 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	100 ha	0 ha	0 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman mangrove	12 ha	0 ha	3 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman bambu	10 ha	10 ha	0 ha	-	0 %		10 ha	100,00 %
		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	80 ha	0 ha	20 ha	-	0 %		0 ha	0 %
	41 Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK II / KPH Sawitto	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	15 ha	0 ha	0 ha	-	0 %		0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman bambu	30 ha	5 ha	15 ha	-	0 %		5 ha	16,66 %
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	100 ha	0 ha	0 ha	-	0 %		0 ha	0 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Luas pembuatan tanaman mangrove	12 ha	0 ha	3 ha	-	0 %		0 ha
			Luas pembuatan tanaman bambu	10 ha	10 ha	0 ha	-	0 %		10 ha
			Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	80 ha	0 ha	20 ha	10 ha	50 %		10 ha
	42	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK III / KPH Saddang I	Luas pemeliharaan tanaman bambu	55 ha	20 ha	20 ha	-	0 %		20 ha
			Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	280 ha	0 ha	100 ha	-	0 %		0 ha
			Luas pembuatan tanaman bambu	12 ha	0 ha	3 ha	-	0 %		0 ha
			Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	180 ha	100 ha	20 ha	-	0 %		100 ha
	43	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK III / KPH Saddang II	Luas pemeliharaan tanaman bambu	15 ha	0 ha	0 ha	-	0 %		0 ha
			Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	100 ha	0 ha	0 ha	-	0 %		0 ha
			Luas pembuatan tanaman bambu	12 ha	0 ha	3 ha	-	0 %		0 ha
			Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	80 ha	0 ha	20 ha	-	0 %		0 ha
	44	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK IV / KPH Latimojong	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	15 ha	0 ha	0 ha	-	0 %		0 ha
			Luas pemeliharaan tanaman bambu	105 ha	5 ha	45 ha	-	0 %		5 ha
			Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	430 ha	0 ha	165 ha	-	0 %		0 ha
			Luas pembuatan tanaman mangrove	12 ha	0 ha	3 ha	-	0 %		0 ha
			Luas pembuatan tanaman bambu	52 ha	40 ha	3 ha	-	0 %		40 ha
			Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	245 ha	165 ha	20 ha	-	0 %		165 ha
	45	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK IV / KPH Kalaena	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	15 ha	0 ha	0 ha	-	0 %		0 ha
			Luas pemeliharaan tanaman bambu	55 ha	0 ha	20 ha	-	0 %		0 ha
			Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	100 ha	0 ha	0 ha	-	0 %		0 ha



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Luas pembuatan tanaman mangrove	12 ha	0 ha	3 ha	-	0 %		0 ha
			Luas pembuatan tanaman bambu	32 ha	20 ha	3 ha	-	0 %		20 ha
			Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	80 ha	0 ha	20 ha	-	0 %		0 ha
	46	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK IV / KPH Larona Malili	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	15 ha	0 ha	0 ha	-	0 %		0 ha
			Luas pemeliharaan tanaman bambu	25 ha	5 ha	5 ha	-	0 %		5 ha
			Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	115 ha	0 ha	10 ha	-	0 %		0 ha
			Luas pembuatan tanaman mangrove	12 ha	0 ha	3 ha	-	0 %		0 ha
			Luas pembuatan tanaman bambu	12 ha	0 ha	3 ha	-	0 %		0 ha
			Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	85 ha	10 ha	15 ha	-	0 %		10 ha
	47	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK IV / KPH Rongkong	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	150 ha	0 ha	75 ha	-	0 %		0 ha
			Luas pemeliharaan tanaman bambu	65 ha	20 ha	25 ha	-	0 %		20 ha
			Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	275 ha	0 ha	100 ha	-	0 %		0 ha
			Luas pembuatan tanaman mangrove	75 ha	0 ha	0 ha	-	0 %		0 ha
			Luas pembuatan tanaman bambu	20 ha	20 ha	0 ha	-	0 %		20 ha
			Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	160 ha	100 ha	15 ha	-	0 %		100 ha
	48	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK III / KPH Mata Allo	Luas pemeliharaan tanaman bambu	25 ha	10 ha	0 ha	-	0 %		10 ha
			Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	175 ha	0 ha	50 ha	-	0 %		0 ha
			Luas pembuatan tanaman bambu	12 ha	0 ha	3 ha	-	0 %		0 ha
			Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	110 ha	50 ha	15 ha	-	0 %		50 ha
	49		Luas rancangan RHL	5.000 ha	420 ha	1.000 ha	-	0 %		420 ha
										8,4 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Penyusunan dan pengawasan DAS dan RHL	Jumlah buku pengelolaan DAS	2 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100 %		2 buku	100,00 %	
		Jumlah pelaksanaan monitoring dan pembinaan RHL	150 kali	47 kali	30 kali	-	0 %		47 kali	31,33 %	
	50	Pembinaan, penilaian, evaluasi kegiatan RHL dan revegetasi pasca tambang	Jumlah pemegang izin yang melakukan revegetasi pasca tambang	4 izin	0 izin	4 izin	100 %		0 izin	0 %	
	51	Kampanye/gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia	Jumlah masyarakat dan pihak terkait yang hadir dan berpartisipasi pada HMPI	1.000 orang	0 orang	250 orang	-	0 %	0 orang	0 %	
	52	Penguatan aktivitas kelembagaan forum DAS	Jumlah pertemuan/rapat yang dijalankan	16 kali	0 kali	4 kali	-	0 %	0 kali	0 %	
	54	Pendampingan dan bimbingan teknis pelaksanaan RHL	Jumlah pelaksanaan pendampingan dan bimpendampingan RHL	60 kali	0 kali	15 kali	-	0 %	0 kali	0 %	
	55	Pembuatan dan pemeliharaan sumber benih unggul	Jumlah lokasi sumber benih unggul yang dibuat dan dipelihara	4 lokasi	12 lokasi	4 lokasi	100 %		12 lokasi	300 %	
			Jumlah peserta bimbingan teknis pembibitan tanaman hutan bagi pelajar	2.320 orang	0 orang	400 orang	-	0 %	0 orang	0 %	
	56	Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana produksi benih dan bibit tanaman hutan	Jumlah jenis sarana prasarana produksi benih dan bibit tanaman hutan	5 jenis	0 jenis	5 jenis	100 %		5 jenis	100 %	
	57	Pengujian dan sertifikasi benih dan bibit tanaman hutan	Jumlah pemohon yang diproses sertifikasi	75 pemohon	16 pemohon	15 pemohon	-	0 %		16 pemohon	21,33 %
			Jumlah sampel pengujian	75 sampel	16 sampel	15 sampel	-	0 %		16 sampel	21,33 %
	58	Pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman hutan	Jumlah kabupaten pengawasan peredaran benih	23 kab	0 kab	23 kab	-	0 %		0 kab	0 %
	59	Identifikasi calon sumber benih tanaman hutan dan identifikasi pengada/pengedar benih dan bibit tanaman hutan	Jumlah laporan pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan	5 laporan	0 laporan	1 laporan	-	0 %		0 laporan	0 %
	60	Koordinasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca	Jumlah pelaksanaan pertemuan adaptasi dan mitigasi RAD GRK	25 kali	0 kali	5 kali	-	0 %		0 kali	0 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	61	Sosialisasi perbenihan tanaman hutan	Jumlah peserta sosialisasi perbenihan tanaman hutan	400 orang	0 orang	100 orang	-	0 %		0 orang
	62	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK I/ KPH Bulusaraung)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	17.225 batang	3.445 batang	3.445 batang	-	0 %		3.445 batang
	63	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK II/ KPH Ajatappareng)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	17.225 batang	3.445 batang	3.445 batang	-	0 %		3.445 batang
	64	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK II/ KPH Bila)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	17.225 batang	3.445 batang	3.445 batang	-	0 %		3.445 batang
	65	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK II/ KPH Sawitto)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	13.780 batang	0 batang	3.445 batang	-	0 %		0 batang
	66	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK III/ KPH Mata Allo)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	17.225 batang	3.445 batang	3.445 batang	-	0 %		3.445 batang
	67	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK III/ KPH Saddang I)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	17.225 batang	3.445 batang	3.445 batang	-	0 %		3.445 batang
	68	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK III/ KPH Saddang II)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	13.780 batang	0 Batang	3.445 Batang	-	0 %		0 Batang
	69	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK IV/ KPH Latimojong)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	17.225 batang	3.445 batang	3.445 batang	-	0 %		3.445 batang
	70	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK IV/ KPH Rongkong)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	17.225 batang	3.445 batang	3.445 batang	-	0 %		3.445 batang
	71	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK IV/ KPH Kalaena)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	13.780 batang	0 batang	3.445 batang	-	0 %		0 batang
	72	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK IV/ KPH Laroma Malii)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	3.445 batang	3.445 batang	0 batang	-	0 %		3.445 batang
	73	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK V/ KPH Walanae)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	3.445 batang	3.445 batang	0 batang	-	0 %		3.445 batang
	75	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK VI dan VII/KPH Jeneberang I)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	3.445 batang	3.445 batang	0 batang	-	0 %		3.445 batang
	76	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK VII dan VIII/KPH Jeneberang II)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	3.445 batang	3.445 batang	0 batang	-	0 %		3.445 batang
	77	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK VIII/KPH Selayar)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	3.445 batang	3.445 batang	0 batang	-	0 %		3.445 batang
	22	Program Perhutanan Sosial	Luas areal wilayah kelola masyarakat dengan skema perhutanan sosial	48.953 ha	80.425,79 ha	45.953 ha	161.133,22 ha	350,64		161.133,22 ha
			Jumlah kelompok yang dibentuk dan dibina	160 kelompok	36 kelompok	32 kelompok	107 kelompok	334,37		143 kelompok
										89,37 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	1 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK VI dan CDK VII / KPH Jeneberang I	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	10 kelompok tani	2 kelompok tani	2 kelompok tani	25 kelompok tani	1250 %		27 kelompok tani	270 %
	2 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK VII dan CDK VIII / KPH Jeneberang II	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	9 kelompok tani	1 kelompok tani	2 kelompok tani	0 kelompok tani	0 %		1 kelompok tani	11,11 %
	3 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK VIII / KPH Selayar	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	8 kelompok tani	0 kelompok tani	2 kelompok tani	0 kelompok tani	0 %		0 kelompok tani	0 %
	4 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK V / KPH Cenrana	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	9 kelompok tani	1 kelompok tani	2 kelompok tani	0 kelompok tani	0 %		1 kelompok tani	11,11 %
	5 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK V / KPH Walanae	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	10 kelompok tani	2 kelompok tani	2 kelompok tani	17 kelompok tani	850 %		19 kelompok tani	190 %
	6 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK I / KPH Bulusaraung	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	9 kelompok tani	1 kelompok tani	2 kelompok tani	2 kelompok tani	100 %		3 kelompok tani	33,33 %
	7 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK II / KPH Ajatappareng	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	8 kelompok tani	0 kelompok tani	2 kelompok tani	0 kelompok tani	0 %		0 kelompok tani	0 %
	8 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK II / KPH Bila	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	9 kelompok tani	1 kelompok tani	2 kelompok tani	3 kelompok tani	150 %		4 kelompok tani	44,44 %
	9 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK II / KPH Sawitto	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	9 kelompok tani	1 kelompok tani	2 kelompok tani	0 kelompok tani	0 %		1 kelompok tani	11,11 %
	10 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK III / KPH Saddang I	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	10 kelompok tani	2 kelompok tani	2 kelompok tani	0 kelompok tani	0 %		2 kelompok tani	20,00 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	11	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK III / KPH Saddang II	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	9 kelompok tani	1 kelompok tani	2 kelompok tani	0 kelompok tani	0 %	1 kelompok tani	11,11 %
	12	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK IV / KPH Latimojong	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	9 kelompok tani	1 kelompok tani	2 kelompok tani	0 kelompok tani	0 %	1 kelompok tani	11,11 %
	13	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK IV / KPH Rongkong	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	8 kelompok tani	0 kelompok tani	2 kelompok tani	0 kelompok tani	0 %	0 kelompok tani	0 %
	14	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK IV / KPH Kalacena	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	8 kelompok tani	0 kelompok tani	2 kelompok tani	0 kelompok tani	0 %	0 kelompok tani	0 %
	15	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK IV / KPH Larona Malili	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	8 kelompok tani	0 kelompok tani	2 kelompok tani	0 kelompok tani	0 %	0 kelompok tani	0 %
	16	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK III / KPH Mata Allo	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	9 kelompok tani	1 kelompok tani	2 kelompok tani	0 kelompok tani	0 %	1 kelompok tani	11,11 %
	33	Pembinaan dan peningkatan kapasitas penyuluhan kehutanan	Jumlah penyuluhan kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	400 Orang	0 orang	100 orang	0 orang	0 %	0 orang	0 %
	34	Pembinaan, monitoring dan evaluasi perhutanan sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang dibina, dimonitoring dievaluasi	100 kelompok	20 kelompok	20 kelompok	6 kelompok	30 %	26 kelompok	26,00 %
	35	Pertemuan koordinasi dan peningkatan kapasitas pendamping dan kelompok usaha perhutanan sosial	Jumlah pelaksanaan pertemuan perhutanan sosial	4 kali	0 kali	1 kali	0 kali	0 %	0 kali	0 %
			Jumlah pendamping dan kelompok usaha perhutanan sosial yang ditingkatkan kapasitasnya	64 orang	0 orang	16 orang	0 orang	0 %	0 orang	0 %
	36		Jumlah koperasi tani hutan yang dibentuk	5 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	0 kelompok	0 %	1 kelompok	20 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembentukan koperasi tani hutan dan peningkatan kelas KTH	Jumlah KTH kelas kemampuan madya dan utama	11 kelompok	11 kelompok	2 kelompok	0 kelompok	0 %		11 kelompok	100 %
	37	Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan	Jumlah unit penyelenggara penyuluhan	16 unit penyelenggara	16 unit penyelenggara	16 unit penyelenggara	0 unit penyelenggara	0 %	16 unit penyelenggara	100 %
23	Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati	Persentase tindak pidana khusus kehutanan yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %
	17	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Jeneberang I	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	0 kali	18 kali	20 kali	111,11%	20 kali	27,77 %
	18	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Jeneberang II	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	0 kali	18 kali	18 kali	100 %	18 kali	25,00 %
	19	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Selayar	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	0 kali	18 kali	18 kali	100 %	18 kali	25,00 %
	20	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Cenrrana	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	0 kali	18 kali	18 kali	100 %	18 kali	25,00 %
	21	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Walanae	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	0 kali	18 kali	18 kali	100 %	18 kali	25,00 %
	22	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Bulusaraung	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	0 kali	18 kali	18 kali	100 %	18 kali	25,00 %
	23	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Ajatappareng	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	0 kali	18 kali	27 kali	150 %	27 kali	37,50 %
	24	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Bila	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	0 kali	18 kali	25 kali	138,88 %	25 kali	34,72 %
	25	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Sawitto	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	0 kali	18 kali	28 kali	155,55 %	28 kali	38,88 %
	26	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Saddang I	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	0 kali	18 kali	33 kali	183,33 %	33 kali	45,83 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	27	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Saddang II	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	0 kali	18 kali	18 kali	100 %		18 kali	25,00 %
	28	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Latimojong	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	0 kali	18 kali	18 kali	100 %		18 kali	25,00 %
	29	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Rongkong	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	0 kali	18 kali	18 kali	100 %		18 kali	25,00 %
	30	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Kalaena	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	0 kali	18 kali	18 kali	100 %		18 kali	25,00 %
	31	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Larona Malili	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	0 kali	18 kali	18 kali	100 %		18 kali	25,00 %
	32	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Mata Allo	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	0 kali	18 kali	18 kali	100 %		18 kali	25,00 %
	33	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan wilayah KPH. Jeneberang I	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	5 jenis	1 jenis	1 jenis	0 jenis	0 %		1 jenis	20,00 %
	34	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Jeneberang II	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	4 jenis	0 jenis	1 jenis	0 jenis	0 %		0 jenis	0 %
	35	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Selayar	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	4 jenis	0 jenis	1 jenis	0 jenis	0 %		0 jenis	25,00 %
	36	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Cenrana	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	4 jenis	0 jenis	1 jenis	0 jenis	0 %		0 jenis	0 %
	37	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Walanae	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	5 jenis	1 jenis	1 jenis	0 jenis	0 %		1 jenis	20,00 %
	38	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Bulusaraung	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	5 jenis	1 jenis	1 jenis	0 jenis	0 %		1 jenis	20,00 %
	39	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Ajatappareng	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	5 jenis	0 jenis	1 jenis	0 jenis	0 %		0 jenis	0 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	40	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Bila	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	4 jenis	0 jenis	1 jenis	1 jenis	100,00 %		1 jenis	25,00 %
	41	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Sawitto	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	4 jenis	0 jenis	1 jenis	0 jenis	0 %		0 jenis	0 %
	42	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Saddang I	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	4 jenis	0 jenis	1 jenis	0 jenis	0 %		0 jenis	0 %
	43	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Saddang II	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	5 jenis	1 jenis	1 jenis	0 jenis	0 %		1 jenis	20,00 %
	44	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Latimong	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	5 jenis	1 jenis	1 jenis	0 jenis	0 %		1 jenis	20,00 %
	45	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Kalaena	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	5 jenis	1 jenis	1 jenis	0 jenis	0 %		1 jenis	20,00 %
	46	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Larona Malili	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	4 jenis	0 jenis	1 jenis	0 jenis	0 %		0 jenis	0 %
	47	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Rongkong	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	5 jenis	1 jenis	1 jenis	0 jenis	0 %		1 jenis	20,00 %
	48	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Mata Allo	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	4 jenis	0 jenis	1 jenis	0 jenis	0 %		0 jenis	0 %
	50	Pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga perlindungan dan pengamanan hutan	Jumlah tenaga perlindungan dan pengamanan hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	260 orang	0 orang	50 orang	0 orang	0 %		0 orang	0 %
	51	Monitoring dan koordinasi perlindungan dan pengamanan hutan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan koordinasi perlindungan dan pengamanan hutan	80 kali	0 kali	20 kali	8 kali	40 %		8 kali	10,00 %
	52	Operasi gabungan dan penanganan tindak pidana khusus kehutanan	Jumlah pelaksanaan operasi gabungan	5 kali	1 kali	1 kali	0 kali	0 %		1 kali	20,00 %
			Jumlah kasus tindak pidana kehutanan	5 kasus	5 kasus	1 kasus	0 kasus	0 %		5 kasus	100,00 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	54	Pembinaan dan monitoring tumbuhan satwa liar yang tidak dilindungi	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring tumbuhan satwa liar yang tidak dilindungi	25 kali	4 kali	5 kali	0 kali	0 %	4 kali	16,00 %
	24	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase luas kebakaran hutan yang dikendalikan	100 %	100 %	100 %				
	1	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Jeneberang I	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang	80 orang	0 orang	0 %	0 orang	0 %
	2	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Jeneberang II	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang	80 orang	0 orang	0 %	0 orang	0 %
	3	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Selayar	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang	80 orang	0 orang	0 %	0 orang	0 %
	4	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Cenrana	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang	80 orang	0 orang	0 %	0 orang	0 %
	5	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Walanae	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang	80 orang	0 orang	0 %	0 orang	0 %
	6	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Bulusaraung	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang	80 orang	0 orang	0 %	0 orang	0 %
	7	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Ajatappareng	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang	80 orang	0 orang	0 %	0 orang	0 %
	8	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Bila	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang	80 orang	0 orang	0 %	0 orang	0 %
	9	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Sawitto	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang	80 orang	0 orang	0 %	0 orang	0 %
	10	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Saddang I	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang	80 orang	0 orang	0 %	0 orang	0 %
	11	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Saddang II	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang	80 orang	0 orang	0 %	0 orang	0 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	12	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Latimojong	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang	80 orang	0 orang	0 %		0 orang
	13	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Rongkong	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang	80 orang	0 orang	0 %		0 orang
	14	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Kalaena	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang	80 orang	0 orang	0 %		0 orang
	15	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Larona Malili	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang	80 orang	0 orang	0 %		0 orang
	16	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Mata Allo	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang	80 orang	0 orang	0 %		0 orang
	17	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK I/ wilayah KPH Bulusaraung)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaran hutan dan lahan	48 kali	0 kali	12 kali	0 kali	0 %		0 kali
			Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang	100 orang	0 orang	0 %		0 orang
	18	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK II/ wilayah KPH Ajatappareng)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaran hutan dan lahan	48 kali	0 kali	12 kali	0 kali	0 %		0 kali
			Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang	100 orang	0 orang	0 %		0 orang
	19	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK II/ wilayah KPH Bila)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaran hutan dan lahan	48 kali	0 kali	12 kali	0 kali	0 %		0 kali
			Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang	100 orang	0 orang	0 %		0 orang
	20	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK II/ wilayah KPH Sawitto)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaran hutan dan lahan	48 kali	0 kali	12 kali	0 kali	0 %		0 kali



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang	100 orang	0 orang	0 %		0 orang	0 %
	21	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK III/ wilayah KPH Mata Allo)	48 kali	0 kali	12 kali	0 kali	0 %		0 kali	0 %
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang	100 orang	0 orang	0 %		0 orang	0 %
	22	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK III/ wilayah KPH Saddang I)	48 kali	0 kali	12 kali	0 kali	0 %		0 kali	0 %
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang	100 orang	0 orang	0 %		0 orang	0 %
	23	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK III/ wilayah KPH Saddang II)	48 kali	0 kali	12 kali	0 kali	0 %		0 kali	0 %
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang	100 orang	0 orang	0 %		0 orang	0 %
	24	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK IV/ wilayah KPH Latimojong)	48 kali	0 kali	12 kali	0 kali	0 %		0 kali	0 %
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang	100 orang	0 orang	0 %		0 orang	0 %
	25	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK IV/ wilayah KPH Rongkong)	48 kali	0 kali	12 kali	0 kali	0 %		0 kali	0 %
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang	100 orang	0 orang	0 %		0 orang	0 %
	26	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK IV/ wilayah KPH Kalaena)	48 kali	0 kali	12 kali	0 kali	0 %		0 kali	0 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang	100 orang	0 orang	0 %		0 orang	0 %
	27	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK IV/ wilayah KPH Larona Malili)	48 kali	0 kali	12 kali	0 kali	0 %		0 kali	0 %
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang	100 orang	0 orang	0 %		0 orang	0 %
	28	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK V/ wilayah KPH Walanae)	48 kali	0 kali	12 kali	0 kali	0 %		0 kali	0 %
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang	100 orang	0 orang	0 %		0 orang	0 %
	29	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK V/ wilayah KPH Cenrana)	48 kali	0 kali	12 kali	0 kali	0 %		0 kali	0 %
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang	100 orang	0 orang	0 %		0 orang	0 %
	30	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK VI dan CDK VII/ wilayah KPH Jeneberang I)	48 kali	0 kali	12 kali	0 kali	0 %		0 kali	0 %
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang	100 orang	0 orang	0 %		0 orang	0 %
	31	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK VII dan CDK VIII/ wilayah KPH Jeneberang II)	48 kali	0 kali	12 kali	0 kali	0 %		0 kali	0 %
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang	100 orang	0 orang	0 %		0 orang	0 %
	32	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK VIII/ wilayah KPH Selayar)	48 kali	0 kali	12 kali	0 kali	0 %		0 kali	0 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang	100 orang	0 orang	0 %		0 orang	0 %
	49	Pengembangan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan	Jumlah jenis sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan	9 jenis	1 jenis	2 jenis	5 jenis	250 %	6 jenis	66,66 %
	53	Monitoring dan pembinaan, pencegahan, pengendalian dan pasca kebakaran hutan dan lahan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan pembinaan, pengendalian dan pasca kebakaran hutan dan lahan	50 kali	10 kali	10 kali	0 kali	0 %	10 kali	20 %
50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %		12 bulan	100 %
	2	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	30 unit	33 unit	30 unit	22 unit	73,33 %	33 unit	110 %
			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	35 unit	88 unit	35 unit	101 unit	288,57 %	88 unit	251,43 %
	3	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	393 orang	379 orang	393 orang	379 orang	96,44 %	379 orang	100 %
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	75 jenis	137 jenis	75 jenis	94 jenis	125,33 %	137 jenis	182,67 %
	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	150 unit	4 unit	30 unit	30 unit	100 %	34 jenis	22,67 %
	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100 %	2 jenis	100 %
	9	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	20 pameran	3 pameran	4 pameran	0 pameran	0 %	3 pamearn	15 %
	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	176 kali	437 kali	176 kali	158 kali	89,77 %	437 kali	248,30 %
51	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0 %		1 unit	100 %
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	100 unit	9 unit	20 unit	27 unit	135 %		36 unit	36 %
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	177 unit	692 unit	177 unit	247 unit	139,55 %		939 unit	530,5 %
	7	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	50 unit	0 unit	25 unit	0 unit	0 %		0 unit	0 %
	9	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	2.221 unit	533 unit	200 unit	200 unit	100%		733 unit	33 %
	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	150 unit	22 unit	30 unit	28 unit	93,33 %		50 unit	33,33 %
52	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	
	1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	225 orang	75 orang	75 orang	75 orang	100 %		150 orang	66,67 %
	2	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	150 %		5 dokumen	100 %
			Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50 %		3 dokumen	30 %
			Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 %		1 dokumen	50 %
			Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	10 dokumen	5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %		7 dokumen	70 %
	3	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	5 usulan kegiatan	3' usulan kegiatan	1 usulan kegiatan	0 usulan kegiatan	100 %		3 usulan kegiatan	60 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	4 Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %		2 laporan	40 %
		Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	500 jenis	28 jenis	100 jenis	100 jenis	100 %		128 jenis	25,60 %
	5 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %		24 laporan	40 %
	6 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	10 laporan	2 laporan	2 laporan	0 laporan	0 %		2 laporan	20 %
53	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% ASN berkinerja sangat baik	80 %	85,33 %	80 %	94,20 %	117,75 %		89,77 %	112,21 %
	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepergawaiian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya	968 orang	3.642 orang	968 orang	890 orang	91,94 %		890 orang	91,94 %
		Jumlah laporan administrasi kepegawaiannya yang disusun	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %		2 laporan	40 %
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	300 orang	0 orang	75 orang	0 orang	0 %		0 orang	0 %



Berdasarkan tabel 2 di atas menggambarkan bahwa capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2020, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja tahun 2020 yaitu Program rehabilitasi hutan dan lahan

Program ini merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi hutan dan lahan kritis baik didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan dengan luas lahan kritis mencapai 442.738,75 ha pada tahun 2019. Upaya rehabilitasi terus dilakukan dengan melakukan kolaborasi antara antara pemerintah provinsi, pusat, swasta dan masyarakat.

Indikator program rehabilitasi hutan dan lahan dan capaiannya sebagai berikut :

- Cakupan ketersediaan jumlah bibit tanaman. Target kinerja pada indikator ini sebanyak 1.000.000 bibit, dan capaian kinerja mencapai 145.786 bibit atau 14,58 %.
- Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi (prioritas). Target kinerja pada indikator ini seluas 1.000 ha dengan capaian kinerja mencapai 510 ha.
- Indeks kualitas tutupan lahan (prioritas). Target kinerja pada indikator ini sebesar 58,62 dengan capaian kinerja sebesar 54,94.

Capaian kinerja yang tidak memenuhi target disebabkan karena :

- Adanya kebijakan nasional yang menekankan penghentian proses pengadaan barang/jasa Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Fisil Tahun Anggaran 2020 berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-126/PK/2020 tanggal 27 maret 2020. Proses pengadaan barang/jasa yang dihentikan adalah seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk semua jenis/metode pengadaan barang/jasa baik secara swakelola maupun kontraktual, baik yang sedang berlangsung maupun akan berlangsung.
- Adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan rasionalisasi dan refocusing anggaran program dan kegiatan



dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Selatan.

- Dengan adanya kebijakan nasional dan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan tersebut, maka anggaran pada program rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2020 yang umumnya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Penugasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, menjadi alternatif rasionalisasi anggaran. Dengan demikian target kinerja rehabilitasi hutan dan lahan tidak tercapai pada tahun 2020.
2. Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja yaitu :

- a. Program penataan hutan dan pemanfaatan hutan (prioritas)

Program ini bertujuan mengoptimalkan potensi hutan lindung dan hutan produksi, yang berorientasi pada aspek ekologi dan ekonomi. Luas kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 2.610.060 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 362/MenLHK/setjen/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019. Adapun kawasan hutan yang menjadi kewenangan provinsi adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi dengan luas mencapai 1.780.030 atau 68,19 %.

Indikator program penataan hutan dan pemanfaatan hutan serta capaianya sebagai berikut :

- Indikator persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya (prioritas). Target kinerja pada indikator ini sebesar 64,67 % dan capaian kinerja mencapai 67,05 %
- Indikator jumlah produksi hasil hutan bukan kayu. Target kinerja pada indikator ini sebesar 339,5 ton dan capaian kinerja mencapai 48.491,08 ton.
- Indikator jumlah produksi hasil hutan kayu. Target kinerja pada indikator ini sebesar 76.947,18 m³ dan capaian kinerja mencapai 1.145.368,93 m³.



Capaian kinerja program penataan hutan dan pemanfaatan hutan melebihi target dipengaruhi oleh :

- Kawasan hutan kewenangan provinsi telah dibagi melalui wilayah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai unit/pemangku wilayah kawasan hutan, berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 665/MenLHK/Setjen/PLA.0 /11/2017 tentang penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Selatan serta berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
- KPH sebanyak 16 unit yang tersebar pada kabupaten/kota, dengan kewenangan untuk mengelola, menata dan memanfaatkan potensi sumberdaya pada wilayah kelola masing-masing
- Pemantauan, pembinaan dan pengendalian terhadap produksi hasil hutan bukan kayu (rotan, getah pinus, damar) yang berasal dari kawasan hutan
- Pemantauan, pembinaan dan pengendalian terhadap produktivitas pemenuhan bahan baku industri primer kehutanan dalam rangka produksi hasil hutan kayu olahan.

b. Program perhutanan sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan didalam dan disekitar kawasan hutan dalam rangka pemberdayaan responsif gender melalui pemberian peluang kerja dan kesempatan berusaha yang berbasis pelestarian sumber daya hutan.

Perhutanan sosial menjadi program nasional dengan memberikan akses pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam jangka waktu tertentu dengan azas kelestarian dan keberlanjutan hutan. Akses pengelolaan hutan tersebut terdiri dari hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan.



Partisipasi masyarakat dalam akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan masih didominasi peran laki-laki dibanding perempuan. Keterlibatan peran laki-laki dalam keanggotaan kelompok tani hutan mencapai ± 88,38 % dan perempuan mencapai 11,62 %. Dengan demikian peran perempuan belum mencapai 30 % keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Kelompok Tani Hutan.

Kesetaraan gender dalam akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan tetap memberi peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan. Namun kondisi sosial kultural Sulawesi Selatan masih terdapat anggapan masyarakat bahwa perempuan setelah menikah memiliki peran penting untuk mengurus rumah tangga bahkan menjadi tolak ukur keberhasilan jika mampu mengurus keluarga dengan baik. Hal ini menggambarkan bahwa peran perempuan masih dibatasi kultural dan keterlibatan pengelolaan hutan bersifat pasif serta berperan pada administrasi kelompok. Selain itu kondisi aksesibilitas lokasi pengelolaan hutan sulit terjangkau kendaraan.

Dalam kondisi pengolahan hasil hutan baik kayu dan bukan kayu yang didominasi laki-laki memberi gambaran bahwa pengelolaan hasil hutan membutuhkan tenaga, pengetahuan dan pengalaman teknis yang spesifik. Sebagai contoh dalam pengolahan gula aren mulai tahapan pemilihan pohon aren, penyadapan nira aren, pengangkutan nira aren ke tempat pemasakan aren, dan tahapan pemasakan aren itu sendiri membutuhkan tenaga, pengetahuan serta pengalaman teknis yang spesifik, yang mana hal itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan keterlibatan pasif perempuan dalam pengelolaan hasil hutan berada pada tahapan akhir yaitu pengemasan dan pemasaran produk hasil hutan.

Indikator program perhutanan sosial dan capaiannya sebagai berikut :

- Luas areal wilayah kelola masyarakat dengan skema perhutanan sosial. Target kinerja pada indikator ini seluas 45.953 ha dan capaian kinerja mencapai 161.133,22 ha atau 350,65 %.



- Jumlah kelompok yang dibentuk dan dibina. Target kinerja pada indikator ini sebanyak 32 kelompok dan capaian kinerja mencapai 107 kelompok atau 334,38 %

Capaian kinerja program perhutanan sosial melebihi target dipengaruhi oleh :

- Adanya kelompok kerja percepatan perhutanan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan dengan tugas menyusun roadmap perhutanan sosial, koordinasi dan sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan, fasilitasi pengembangan usaha, pengendalian, monitoring dan evaluasi perhutanan sosial, fasilitasi pembentukan kelompok kerja percepatan perhutanan sosial kabupaten/kota, diseminasi dan informasi perhutanan sosial, fasilitasi dan mediasi konflik tenurial perhutanan sosial. . Kelompok kerja perhutanan sosial terdiri atas pemerintah pusat (BPSKL), pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, lembaga pendidikan tinggi (Universitas Hasanuddin dan Universitas Muhammadiyah), media, yayasan, LSM, Organisasi non Pemerintah
- Keterlibatan penyuluh dan pendamping perhutanan sosial mulai penyiapan perhutanan sosial, pendampingan kelola kelembagaan, pendampingan kelola usaha, pendampingan kelola kawasan kelompok tani.
- Fasilitasi alat usaha ekonomi produktif kepada kelompok tani hutan sebagai upaya pertambahan nilai ekonomi usaha kelompok.

3. Program yang mencapai target kinerja sebagai berikut :

- a. Program perlindungan hutan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem

Program ini bertujuan perlindungan pengelolaan kawasan hutan lindung dan konservasi lainnya sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomi, ekologi dan sosial secara optimal

Indikator program perlindungan hutan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta capaiannya sebagai berikut :

- Persentase tindak pidana khusus kehutanan yang ditangani. Target kinerja indikator sebesar 100 % dan capaian kinerja mencapai 100 %.



Faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja yaitu :

- Melakukan patroli rutin yang dilaksanakan oleh polisi kehutanan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi wilayah pengelolaan KPH sebagai upaya preventif pengedalian perlindungan hutan dan hasil hutan
- Memasang papan informasi kawasan hutan
- Melakukan penyuluhan dan pendekatan persusasif kepada tokoh masyarakat setempat
- Koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan kasus tindak pidana kehutanan (KLHK, aparat penegak hukum)

b. Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan

Program ini bertujuan bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan para pihak dan kesiap-siagaan personil dan peralatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam menurunkan jumlah titik api (hotspot).

Indikator program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan serta capaianya sebagai berikut :

- Cakupan luas kebakaran hutan yang dikendalikan. Target kinerja indikator ini adalah 100 % dan capaian kinerja mencapai 100 %.

Faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja yaitu :

- Ketersediaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan di KPH berupa jet shooter
- Koordinasi yang intensif dengan Manggala Agni KLHK (unit pengendalian kebakaran hutan)

c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

d. Program pelayanan administrasi perkantoran

e. Program peningkatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja

f. Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur

Pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 memberi kontribusi terhadap pembangunan daerah Sulawesi Selatan diantaranya :



1. Kontribusi ekonomi terhadap PDRB Sulawesi Selatan.

Kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan tergabung pada PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pertumbuhan PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha Sulawesi Selatan pada tahun 2018 memberi kontribusi sebesar 5,27 % dan pada tahun 2019 sebesar 2,80 %.

Khusus kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan berdasarkan lapangan usaha memberi kontribusi sebesar 0,06 % pada tahun 2018 dengan nilai PDRB sebesar 289.321,7 milyar dan pada tahun 2019 sebesar 0,06 % dengan nilai PDRB sebesar Rp. 306.553,3 milyar. Kontribusi kehutanan tersebut berasal dari produksi hasil hutan kayu olahan dan produksi hasil hutan bukan kayu, dan belum menghitung nilai pemanfaatan jasa lingkungan/ekowisata.

2. Rehabilitasi hutan dan lahan

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya perbaikan daya dukung lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Rehabilitasi hutan dan lahan memberi kontribusi terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Salah satu unsur IKLH adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang menjadi sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai IKTL provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 54,94 dan tahun 2019 seberar 58,06.

3. Kerusakan kawasan hutan

Pengendalian kerusakan kawasan hutan dan lahan adalah upaya perlindungan daya tampung lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Perlindungan kawasan hutan dari kerusakan yang disebabkan kebakaran hutan, perambahan hutan, illegal logging.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun indikator



kinerja kunci outcome Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial
2. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)
3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi



Tabel 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		%	-	14,90	15,65	16,25	12,19	19,75	15,65	16,25	
2	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)		%		1,38	17,59	16,20	17,43	0,70	17,59	16,20	
3	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi		%		55,00	57,91	61,60	55,73	35,39	57,91	61,60	
4	Kontribusi kehutanan terhadap PDRB		%	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	
5	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan		%	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	



Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) outcome sesuai table diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial

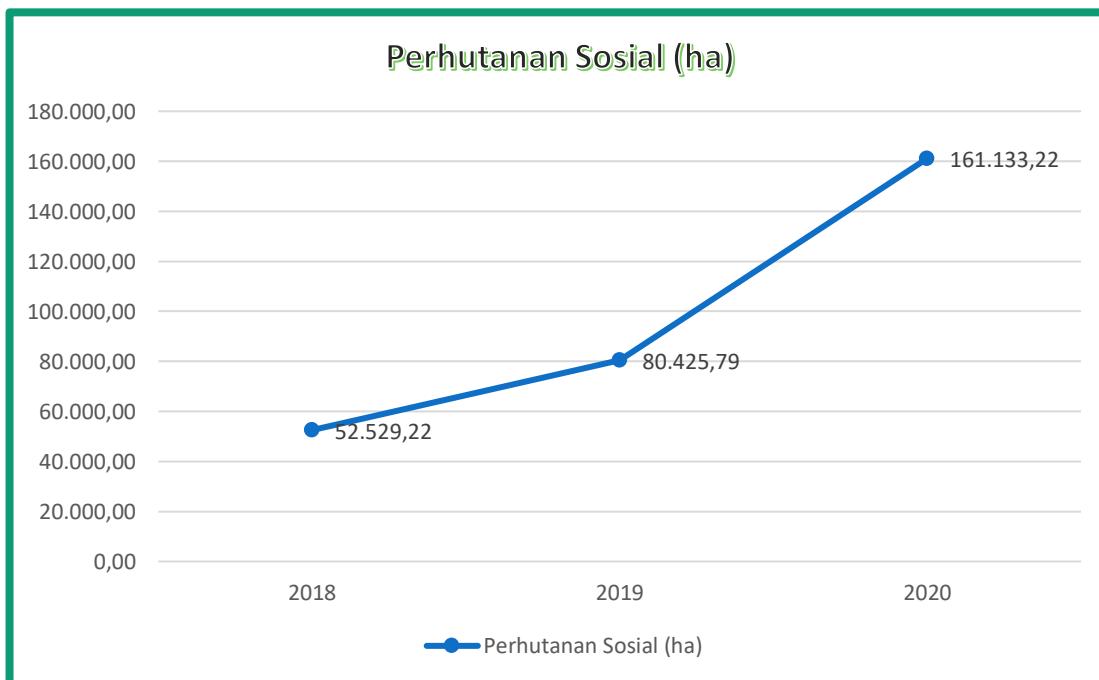
Perhutanan sosial menjadi suatu solusi dan tantangan pembangunan sektor kehutanan. Keadaan ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan stakeholder lainnya. Perhutanan sosial menjadi solusi karena masyarakat dan lembaga desa diberi akses legal pengelolaan hutan dalam jangka waktu tertentu. Dengan akses legal tersebut masyarakat dapat mengelola kawasan hutan dengan mempertimbangkan potensi hutan tersebut, dengan harapan mampu mendorong perekonomian mikro bagi masyarakat.

Pencapaian pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial sampai dengan tahun 2020 mencapai 161.133,22 ha atau 9,05 % dari luas hutan lindung dan hutan produksi seluas 1.780.029 ha.

Perkembangan perhutanan sosial dapat dilihat pada diagram berikut :

Diagram 1

Perkembangan perhutanan sosial





Akses legal pengelolaan hutan dilaksanakan dalam bentuk skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan Kulin KK, yang dikelola oleh kelompok tani hutan berjumlah 400 kelompok tani atau 19,75 % dari total usulan KTH yang terintegrasi.

Diagram 2
Kelompok Tani Hutan Tahun 2020



Perkembangan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini memberi gambaran bahwa animo masyarakat untuk mengelola hutan semakin besar yang tentunya diperlukan pembinaan dan pengendalian, serta peningkatan usaha masyarakat sehingga dapat memberi dampak peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui perhutanan sosial menjadi salah satu solusi penyelesaian sengketa tenurial lahan hutan yang selama ini menjadi persoalan pembangunan kehutanan.

2. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi).

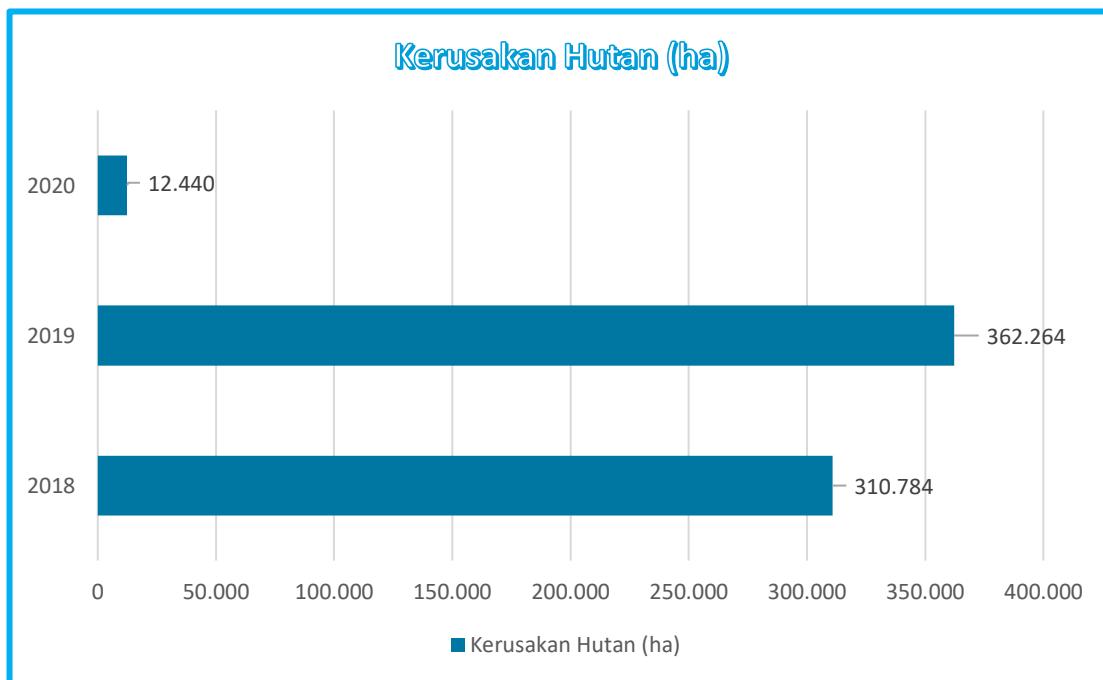
Kerusakan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi tantangan pembangunan kehutanan. Aktivitas masyarakat sekitar hutan menjadi potensi terjadinya kerusakan hutan, sebagian besar masyarakat



memanfaatkan hutan sebagai lahan budidaya tanaman semusim yang memiliki masa panen singkat. Upaya perlindungan dan pengamanan hutan dari kerusakan hutan terus dilakukan dengan pendekatan persuasif sehingga diharapkan adanya kesadaran untuk menjaga ekosistem hutan yang ada.

Kejadian kerusakan hutan disebabkan pengolahan hutan tanpa izin (perambahan hutan), kebakaran hutan dan illegal logging. Perkembangan kerusakan hutan disajikan pada diagram berikut :

Diagram 3
Kerusakan Kawasan Hutan



Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa, kerusakan hutan mengalami penurunan menjadi 12.440 ha. Penurunan ini disebabkan karena tahun 2019 luas lahan kritis masih menjadi bagian penghitungan kerusakan hutan, yang semestinya menjadi bagian penghitungan luas lahan kritis yang direhabilitasi.

3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi

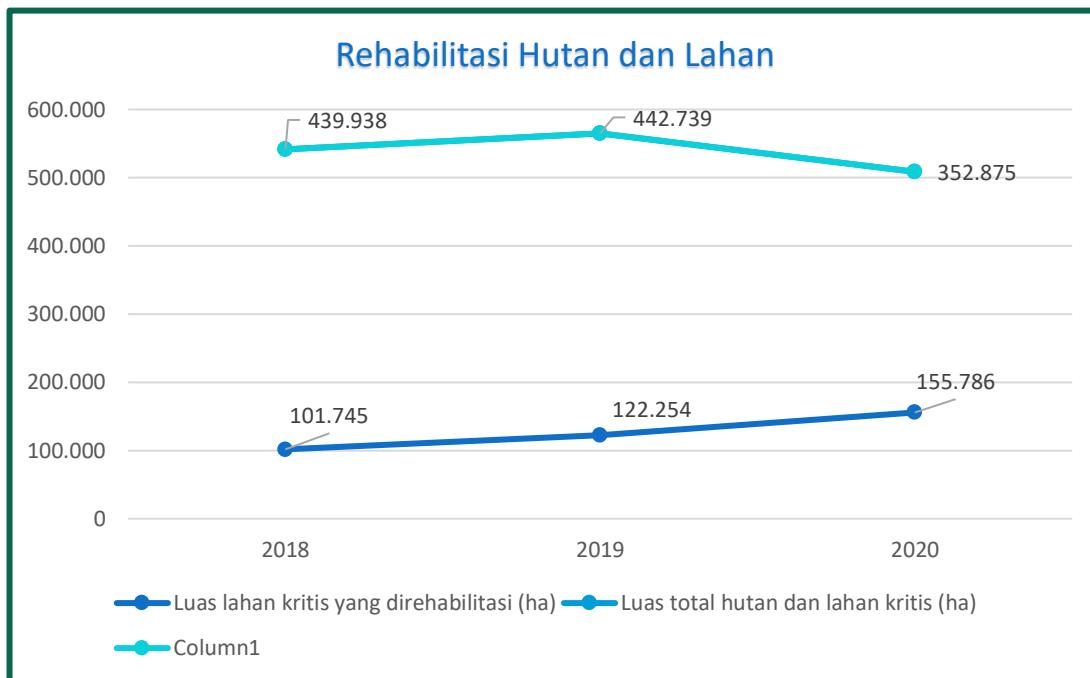
Lahan kritis menjadi prioritas pembangunan kehutanan, dengan luas lahan kritis mencapai 352.874,59 ha pada tahun 2020. Salah satu strategi penanganan lahan kritis melalui pelibatan semua stakeholder untuk



melakukan penanaman. Perkembangan rehabilitasi hutan dan lahan disajikan sebagai berikut :

Diagram 4

Rehabilitasi Hutan dan Lahan



4. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Hutan memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, tetapi hanya sebagian kecil dari sumber daya hutan yang berkontribusi secara riil terhadap penerimaan negara dan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari pencapaian Kontribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ketahun mengalami penurunan, dimana capaian pada tahun 2018 sebesar 0,06 persen dan tahun 2019 tetap 0,06 persen. Secara persentase menunjukkan kecilnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan, namun secara nilai terus mengalami pertambahan dari tahun ke tahun.

Kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan berdasarkan lapangan usaha memberi kontribusi sebesar 0,06 % pada tahun 2018 dengan nilai PDRB sebesar 289.321,7 miliar dan pada tahun 2019 sebesar 0,06 % dengan nilai PDRB sebesar Rp. 306.553,3 miliar. Kontribusi kehutanan



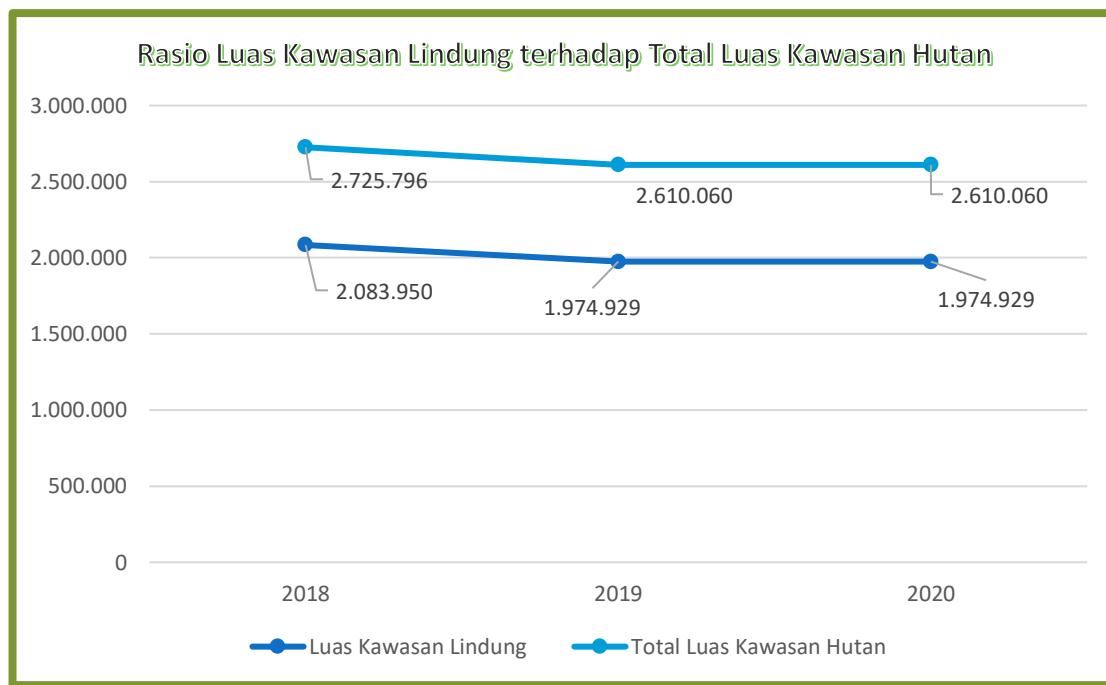
tersebut berasal dari produksi hasil hutan kayu olahan dan produksi hasil hutan bukan kayu, dan belum menghitung nilai pemanfaatan jasa lingkungan/ekowisata.

5. Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan

Bila melihat rasio luas kawasan lindung terhadap total Luas Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2015 sampai tahun 2019, menunjukkan bahwa rasio luas kawasan lindung terhadap luas kawasan hutan di Sulawesi Selatan pada periode sebelumnya (2015-2018) sebesar 76,45 persen menurun menjadi 75,66 persen pada tahun 2020.

Diagram 5

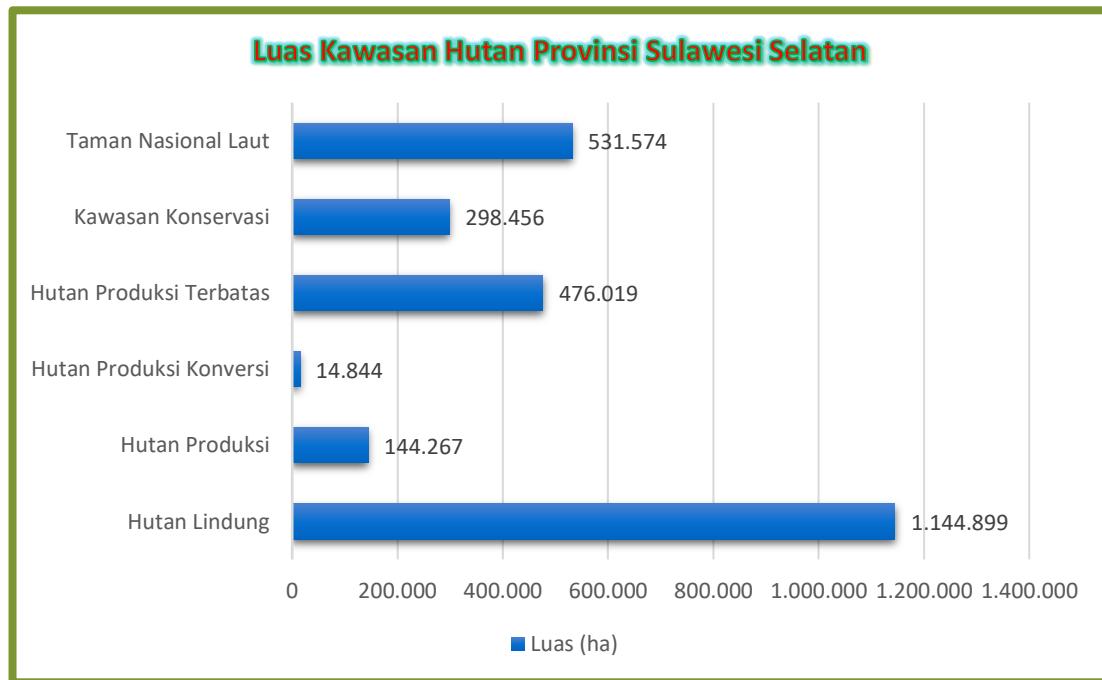
Rasio Luas Kawasan Lindung terhadap Total Luas Kawasan Hutan



Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan tahun 2020 mencapai 75,66 %, merupakan luas rasio luas kawasan hutan lindung dan Kawasan pelestarian alam (hutan suaka alam, cagar alam) terhadap luas Kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 362/MenLHK/setjen/PLA.0/5/2019 bahwa luas kawasan hutan di provinsi Sulawesi Selatan seluas 2.610.060 ha, tersaji pada diagram berikut :



Diagram 6
Luas Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan



2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Isu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain :

1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung diperuntukkan untuk hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan akan memberi dampak pada ekonomi daerah namun harus tetap memperhatikan asas kelestarian dan keberlanjutan. Potensi kawasan hutan cukup beragam mulai pengembangan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan/ekowisata, namun belum dimanfaatkan secara optimal karena membutuhkan dukungan berbagai pihak.

2. Adanya kerusakan wilayah DAS

Di provinsi Sulawesi Selatan terdapat DAS lintas provinsi, DAS lintas kabupaten, dan DAS dalam Kabupaten. Kondisinya terdapat DAS yang perlu



dipertahankan dan DAS yang perlu dipulihkan. Salah satu DAS lintas provinsi yang memerlukan pemulihan yaitu DAS Saddang dan salah satu DAS lintas kabupaten yang perlu dipulihkan yaitu DAS Jeneberang seluas 78.883,90 ha.

3. Masih adanya kasus illegal logging

4. Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan hutan

Salah satu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan yaitu melalui perhutanan sosial dengan skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kulin KK. Keikutsertaan masyarakat masih relatif rendah.

Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6394/MENLHK-PKTL/REN/PLA.O/7/2019 Tanggal 23 juli 2019 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi IV, dengan target seluas 242.613 Ha, maka persentase capaian luasan perhutanan sosial sebesar 33,14 % dari target yang ditetapkan.

Permasalahan yang masih menjadi tantangan di sektor kehutanan antara lain :

1. Belum optimalnya upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Masih terdapatnya konflik kepemilikan dan pemanfaatan kawasan hutan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan;
3. Masih terdapatnya lahan kritis dan belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;
4. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan belum optimal, utamanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 dengan memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah. maka kebutuhan rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022, sebagaimana tabel berikut :



Tabel 4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Rp. 21.882.302.50	61,60 %	Rp. 21.882.302.550	Program Pengelolaan Hutan		Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi	61,60 %	Rp. 9.101.569.500	
				16,20 %				Percentase kerusakan hutan	16,20 %		
				92.336,62 m ³				Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	92.336,62 m ³		
				283 ton				Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	283 ton		
1	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan KPH Kewenangan Provinsi		Rp. 729.429.900	1.780.029 ha	Rp. 729.429.900	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan KPH Kewenangan Provinsi		Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	1.780.029 ha	Rp. 730.000.000	
a	Penyusunan rancangan bangun tata hutan wilayah KPH		Rp. 100.000.000	4 dokumen	Rp. 100.000.000	Penyusunan rancangan bangun tata hutan wilayah KPH	Makassar	Jumlah dokumen rancangan bangun KPH	4 dokumen	Rp. 100.000.000	
b	Pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPH		Rp. 300.000.000	748 buah	Rp. 300.000.000	Pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPH	Sulsel	Jumlah patok batas blok dan petak	748 buah	Rp. 300.000.000	
				150 km			Sulsel	Panjang penataan batas blok dan petak	150 km		
c	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		Rp. 79.430.000	3 jenis	Rp. 79.430.000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Sulsel	Jumlah jenis sarana prasarana operasionalisasi KPH	3 jenis	Rp. 80.000.000	
d	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan		Rp. 249.999.900	500 ha	Rp. 249.999.900	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Sulsel	Luas Wilayah yang diusulkan untuk perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	500 ha	Rp. 250.000.000	
2	Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Rp. 0 1.500.000.00	24 dokumen	Rp. 1.500.000.000	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	24 dokumen	Rp. 1.500.000.000	
a	Penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Rp. 1.500.000.000	7 dokumen	Rp. 1.500.000.000	Penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Makassar	Jumlah dokumen RPHJP KPH	7 dokumen	Rp. 1.500.000.000	
				16 dokumen			Makassar	Jumlah dokumen RPHJPd	16 dokumen		



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Rp. 654.873.600	Rp. 25.000.000	Rp. 654.873.600	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan	Rp. 25.000.000	Rp. 305.120.000		
a	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi		Rp. 74.873.600	110.425,79 ha	Rp. 74.873.600	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	Sulsel	Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan produksi	110.425,79 ha	Rp. 75.120.000		
				60 izin			Sulsel	Jumlah izin wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan produksi	60 izin			
				3.041,94 ton			Sulsel	Jumlah produksi HHBK di kawasan hutan produksi	3.041,94 ton			
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung		Rp. 80.000.000	16 lokasi	Rp. 80.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Sulsel	Jumlah Lokasi 'Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan lindung	16 lokasi	Rp. 80.000.000		
				16 lokasi			Sulsel	Jumlah Lokasi wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan lindung	16 lokasi			
				16 lokasi			Sulsel	Jumlah Lokasi produksi HHBK di kawasan hutan lindung	16 lokasi			
c	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan/atau Jasa Lingkungan		Rp. 500.000.000	1 lokasi	Rp. 500.000.000	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan/atau Jasa Lingkungan	Sulsel	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	Rp. 150.000.000		
4	Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara		Rp. 15.757.378.750	1.571 ha	Rp. 15.757.378.750	Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara		Luas rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara	1.571 ha	Rp. 3.323.343.500		
a	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan		Rp. 99.913.500	5 lokasi	Rp. 99.913.500	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Sulsel	Jumlah lokasi sumber benih unggul yang dikembangkan	5 lokasi	Rp. 100.000.000		
			Rp. 600.000.000	4 lokasi	Rp. 600.000.000		Sulsel	Jumlah unit persamaian	4 lokasi	Rp. 600.000.000		
b	Pembangunan Hutan Rakyat di luar Kawasan Hutan Negara		Rp. 2.328.083.000	233 ha	Rp. 2.328.083.000	Pembangunan Hutan Rakyat di luar Kawasan Hutan Negara	Sulsel	Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	233 ha	Rp. 1.720.536.000		
				233 ha			Sulsel	Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	233 ha	Rp. 607.547.500		



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
c	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)		Rp. 49.994.200	1 dokumen	Rp. 49.994.200	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Yang Disusun.	1 dokumen	Rp. 50.000.000		
d	Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan.		Rp. 185.132.200	30 kali	Rp. 185.132.200	Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan.	Sulsel	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan atau pengawasan rehabilitasi lahan	30 kali	Rp. 185.260.000		
				15 kali			Sulsel	Jumlah pelaksanaan pendampingan dan bimbingan teknis	15 kali			
e	Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara		Rp. 12.494.255.850	10 ha	Rp. 12.494.255.850	Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara	Sulsel	Luas lahan penghijauan lingkungan diluar kawasan hutan negara	10 ha	Rp. 60.000.000		
5	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Rp. 2.508.186.000	100 %	Rp. 2.508.186.000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Sulsel	Persentase Jumlah Kasus Kerusakan Kawasan hutan yang tertangani	100 %	Rp. 2.508.976.000		
a	Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan		Rp. 799.819.200	424 orang	Rp. 799.819.200	Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Sulsel	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	424 orang	Rp. 799.836.000		
				30 orang			Sulsel	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	30 orang			
b	Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan		Rp. 1.370.880.000	768 kali patrol (48 kali/KPH)	Rp. 1.370.880.000	Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Sulsel	Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	768 kali patrol (48 kali/KPH)	Rp. 1.370.880.000		
				5 unit/KPH			Sulsel	Jumlah papan bicara pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	5 unit/KPH			
c	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Rp. 238.449.200	288 kali	Rp. 238.449.200	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Sulsel	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring perlindungan hutan	288 kali	Rp. 238.630.000		
				1 lokasi			Sulsel	Jumlah lokasi pelaksanaan operasi gabungan penanganan tindak pidana khusus kehutanan	1 lokasi			
d	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan		Rp. 99.037.600	12 kali	Rp. 99.037.600	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan	Sulsel	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring pencegahan dan	12 kali	Rp. 99.630.000		



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
kebakaran Hutan dan lahan				16 laporan		kebakaran Hutan dan lahan	Sulsel	penanggulangan kebakaran hutan	16 laporan			
								Jumlah laporan titik api (hot spot) yang dipantau dan dikendalikan				
6	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Rp. 227.469.900	3 jenis	Rp. 227.469.900	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jenis HHBK yang diolah oleh pemegang izin	3 jenis	Rp. 227.500.000		
a	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati		Rp. 75.000.000	49.187,134 ton	Rp. 75.000.000	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Sulsel	Jumlah Produksi HHBK yang diolah oleh pemegang izin	49.187,134 ton	Rp. 75.000.000		
b	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Rp. 2.470.000	5 izin	Rp. 2.470.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Sulsel	Jumlah komitmen izin fasilitasi penerbitan IUIPHBK	5 izin	Rp. 2.500.000		
c	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya		Rp. 75.000.000	100 ha	Rp. 75.000.000	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Sulsel	Luas areal budidaya HHBK	100 ha	Rp. 75.000.000		
d	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu		Rp. 74.999.900	5 izin	Rp. 74.999.900	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Sulsel	Jumlah pemegang IUIPHBK yang diawasi	5 izin	Rp. 75.000.000		
7	Kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun		Rp. 154.945.600	28.155,1717 ton	Rp. 154.945.600							
a	Rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/tahun		Rp. 74.986.400	60 industri	Rp. 74.986.400	Rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/tahun	Sulsel	Jumlah industri yang aktif dan tertib aturan	60 industri	Rp. 75.000.000		
				3 laporan			Sulsel	Jumlah data produksi kayu olahan	3 laporan			
				16 laporan			Sulsel	Jumlah data asal usul rencana pemenuhan bahan baku	16 laporan			
b	Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun		Rp. 79.959.200	40 orang	Rp. 79.959.200	Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun	Sulsel	Jumlah data sebaran GANIS PHPL yang melaksanakan PUHH pada industry	40 orang	Rp. 80.170.000		
				24 laporan			Sulsel	Jumlah data pemasaran hasil hutan	24 laporan			



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								kayu 52ndus dan ekspor				
			60 industri				Sulsel	Jumlah 52ndustry yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi	60 industri			
8	Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan		Rp. 350.018.800	95 pemohon	Rp. 350.018.800	Perbenihan Tanaman Hutan		Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit tanaman hutan	95 pemohon	Rp. 351.460.000		
a	Penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/ atau bibit terdaftar		Rp. 99.431.200	36 pemohon	Rp. 99.431.200	Penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/ atau bibit terdaftar	Sulsel	Jumlah pemohon pengadaan benih dan pengedar benih/bibit tanaman hutan terdaftar	36 pemohon	Rp. 100.000.000		
				15 lokasi			Sulsel	Jumlah calon sumber benih yang diidentifikasi	15 lokasi			
b	Sertifikasi sumber benih		Rp. 50.239.800	30 pemohon	Rp. 50.239.800	Sertifikasi sumber benih	Sulsel	Jumlah pemohon sertifikasi sumber benih	30 pemohon	Rp. 50.340.000		
c	Sertifikasi mutu benih		Rp. 50.261.800	15 pemohon	Rp. 50.261.800	Sertifikasi mutu benih	Sulsel	Jumlah pemohon sertifikasi mutu benih	15 pemohon	Rp. 50.340.000		
d	Sertifikasi mutu bibit		Rp. 49.641.800	50 pemohon	Rp. 49.641.800	Sertifikasi mutu bibit	Sulsel	Jumlah pemohon sertifikasi mutu bibit	50 pemohon	Rp. 50.000.000		
e	Pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit		Rp. 100.444.200	24 kab/kota	Rp. 100.444.200	Pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit	Sulsel	Jumlah lokasi pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit tanaman hutan	24 kab/kota	Rp. 100.780.000		
B.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA		Rp. 393.757.800	2 jenis	Rp. 393.757.800	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA		Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	2 jenis	Rp. 393.758.000		
1	Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		Rp. 393.757.800	100 penangkar	Rp. 393.757.800	Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	100 penangkar	Rp. 393.758.000		



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
a	Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES		Rp. 393.757.800	200 orang	Rp. 393.757.800	Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Sulsel	Jumlah peserta sosialisasi tata cara perizinan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	200 orang	Rp. 393.758.000		
				1 laporan					1 laporan			
C	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Rp. 0 8.400.072.00	16,25 %	Rp. 8.400.072.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	16,25 %	Rp. 8.400.101.500		
1	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Rp. 0 8.400.072.00	60 sdm	Rp. 8.400.072.000	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah SDM bidang kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	60 sdm	Rp. 8.400.101.500		
				1.000 orang (50 KTH)				Jumlah masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya	1.000 orang (50 KTH)			
				50 KTH				Jumlah usaha perhutanan sosial yang ditingkatkan	50 KTH			
				350 KTH				Jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	350 KTH			
a	Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluhan kehutanan dan SDM bidang kehutanan		Rp. 199.970.600	100 orang	Rp. 199.970.600	Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluhan kehutanan dan SDM bidang kehutanan	Sulsel	Jumlah penyuluhan kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	100 orang	Rp. 200.000.000		
				200 orang				Jumlah SDM Kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	200 orang			
				16 unit penyelenggara				Jumlah unit penyelenggara penyuluhan yang	16 unit penyelenggara			



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
b	Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan		Rp. 199.999.900	2 KTH	Rp. 199.999.900	Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan	Sulsel	Jumlah KTH yang naik kelas kemampuan	2 KTH	Rp. 200.000.000		
				7 klp/orang			Sulsel	Jumlah kelompok tani/orang yang mengikuti lomba wana lestari dan kalpataru	7 klp/orang			
				1 kelompok			Sulsel	Jumlah pembentukan dan pengembangan wana wiyata widyakarya	1 kelompok			
c	Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial		Rp. 8.000.101.500	100 orang	Rp. 8.000.101.500	Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	Sulsel	Jumlah peserta sosialisasi/ Rapat Koordinasi perhutanan sosial	100 orang	Rp. 8.000.101.500		
				84 kelompok tani/KTH			Sulsel	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	84 kelompok tani/KTH			
				82 kelompok			Sulsel	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang dimonitoring dan dievaluasi	82 kelompok			
				100 orang			Sulsel	Jumlah peserta temu usaha KUPS	100 orang			
				2 laporan			Sulsel	Jumlah laporan konflik tenurial PS yang difasilitasi penyelesaiannya	2 laporan			
				10 produk			Sulsel	Jumlah produk KUPS yang dipromosikan	10 produk			
D	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Rp. 2.721.453.132	2 DAS	Rp. 2.721.453.132	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Jumlah DAS yang direhabilitasi	2 DAS	Rp. 2.725.940.000		
1	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Rp. 2.721.453.132	2 DAS	Rp. 2.721.453.132	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sulsel	Jumlah DAS yang dikelola di Provinsi Sulawesi Selatan	2 DAS	Rp. 2.725.940.000		
a	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS		Rp. 75.000.000	2 dokumen	Rp. 75.000.000	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS	Sulsel	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	2 dokumen	Rp. 75.000.000		



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
b	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS		Rp. 98.466.663	2 DAS	Rp. 98.466.663	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Sulsel	Jumlah DAS yang dioptimalisasikan fungsi dan daya dukungnya	2 DAS	Rp. 100.000.000		
c	Penerapan teknik konservasi tanah dan air di wilayah DAS		Rp. 2.100.861.669	34 unit	Rp. 2.100.861.669	Penerapan teknik konservasi tanah dan air di wilayah DAS	Sulsel	Jumlah unit dam penahan	34 unit	Rp. 2.103.815.000		
				22 unit			Sulsel	Jumlah unit gully plug	22 unit			
				80 unit			Sulsel	Jumlah unit sumur resapan	80 unit			
d	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		Rp. 100.000.000	250 orang	Rp. 100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Sulsel	Jumlah masyarakat dan pihak terkait yang hadir dan berpartisipasi pada kegiatan penanaman	250 orang	Rp. 100.000.000		
e	Pengembangan Kelembagaan pengelolaan DAS		Rp. 99.999.800	4 kali	Rp. 99.999.800	Pengembangan Kelembagaan pengelolaan DAS	Sulsel	Jumlah pertemuan rapat yang dilaksanakan	4 kali	Rp. 100.000.000		
f	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS		Rp. 247.125.000	1 tahun	Rp. 247.125.000	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	Sulsel	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	1 tahun	Rp. 247.125.000		
				4 kali			Sulsel	Jumlah pertemuan atau rapat yang dilaksanakan	4 kali			
E	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Rp. 349 123.950.911.	100 %	Rp. 123.950.911.349	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %	Rp. 134.831.316.692,46		
				100 %				Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 %			
				100 %				Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)	100 %			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp. 1.348.259.200	100 %	Rp. 1.348.259.200	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	Rp. 1.348.564.951,46		
a	Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah		Rp. 787.501.600	2 dokumen	Rp. 787.501.600	Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah	2 dokumen	Rp. 787.506.000		



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
b	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Rp. 95.128.600	1 dokumen	Rp. 95.128.600	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	Rp. 95.240.000		
c	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD		Rp. 79.903.600	1 dokumen	Rp. 79.903.600	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	Rp. 80.000.000		
d	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		Rp. 95.188.400	1 dokumen	Rp. 95.188.400	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	Rp. 95.240.000		
e	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Rp. 79.973.600	1 dokumen	Rp. 79.973.600	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	Rp. 80.000.000		
f	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD		Rp. 99.999.800	2 dokumen	Rp. 99.999.800	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Makassar	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	2 dokumen	Rp. 100.000.000		
g	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Rp. 110.563.600	2 dokumen	Rp. 110.563.600	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Makassar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	Rp. 110.578.951,46		
								Jumlah laporan data dan informasi yang dikumpulkan dan dipublikasikan	2 laporan			
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp. 101.243.436.973 73	100 %	Rp. 101.243.436.973	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Makassar	% Penyusuan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	Rp. 112.117.622.984		
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Rp. 100.920.248.73	843 orang	Rp. 100.920.248.773	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Makassar	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji, tunjangan dan TPP	843 orang	Rp. 111.793.652.984		
b	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Rp. 4.999.000	843 orang	Rp. 4.999.000	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Makassar	Jumlah aparat SKPD yang dielola administrasi kepegawaianya	843 orang	Rp. 5.000.000		
								Jumlah administrasi yang disusun	1 laporan			
c	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD		Rp. 5.000.000	50 dokumen	Rp. 5.000.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Makassar	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	50 dokumen	Rp. 5.000.000		
d	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD		Rp. 10.000.000	2 laporan	Rp. 10.000.000	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah pelaporan pelaksanaan akuntansi SKPD	2 laporan	Rp. 10.000.000		
e	Koordinasi dan penyusunan laporan		Rp. 116.108.800	1 laporan	Rp. 116.108.800	Koordinasi dan penyusunan laporan	Makassar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	Rp. 116.155.000		



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	keuangan akhir tahun SKPD					keuangan akhir tahun SKPD						
f	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan		Rp. 42.373.800	1 laporan	Rp. 42.373.800	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	1 laporan	Rp. 42.940.000		
g	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD		Rp. 142.220.600	18 laporan	Rp. 142.220.600	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Makassar	Jumlah pelaporan keuangan yang tersusun	18 laporan	Rp. 142.375.000		
h	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran		Rp. 2.486.000	2 laporan	Rp. 2.486.000	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Makassar	Jumlah pelaporan prognosis yang tersusun	2 laporan	Rp. 2.500.000		
3	Kegiatan Administarsi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Rp. 59.642.100	2 dokumen	Rp. 59.642.100	Kegiatan Administarsi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Penyusuan dokumen laporan barang milik daerah	2 dokumen	Rp. 60.000.000		
a	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD		Rp. 49.694.200	1 dokumen	Rp. 49.694.200	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Makassar	Jumlah laporan penilaian barang milik daerah SKPD	1 dokumen	Rp. 50.000.000		
b	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		Rp. 4.999.900	1 dokumen	Rp. 4.999.900	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah laporan penyusunan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	Rp. 5.000.000		
c	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Rp. 4.948.000	1 dokumen	Rp. 4.948.000	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	Rp. 5.000.000		
4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Rp. 268.444.100	Rp. 1.712.430.000	Rp. 268.444.100	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	Rp. 1.712.430.000	Rp. 268.530.000		
a	Perencanaan pengelolaan retribusi daerah		Rp. 5.000.000	1 laporan	Rp. 5.000.000	Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Makassar	Jumlah laporan perencanaan pengelolaan retribusi daerah	1 laporan	Rp. 5.000.000		
b	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Rp. 116.073.600	1 laporan	Rp. 116.073.600	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah kebijakan retribusi daerah yang disebarluaskan	1 laporan	Rp. 116.155.000		
c	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Rp. 142.370.900	1 laporan	Rp. 142.370.900	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah laporan objek retribusi daerah	1 laporan	Rp. 142.375.000		
d	Pengolahan Data Retribusi Daerah		Rp. 2.499.800	1 laporan	Rp. 2.499.800	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah laporan data retribusi daerah	1 laporan	Rp. 2.500.000		
e	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah		Rp. 2.499.800	1 laporan	Rp. 2.499.800	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Makassar	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	1 laporan	Rp. 2.500.000		



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	Kegiatan Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah		Rp. 1.330.455.000	90	Rp. 1.330.455.000	Kegiatan Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Makassar	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	90	Rp. 1.331.350.000		
a	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Rp. 808.885.000	809 orang	Rp. 808.885.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Makassar	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	809 orang	Rp. 809.000.000		
				399 orang			Makassar	Jumlah pakaian lapangan yang diadakan	399 orang			
				809 orang			Makassar	Jumlah pakaian korpri yang diadakan	809 orang			
				809 orang			Makassar	Jumlah pakaian batik khas daerah yang diadakan	809 orang			
				809 orang			Makassar	Jumlah pakaian olahraga dan perlengkapannya yang diadakan	809 orang			
b	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawai		Rp. 98.321.800	1 laporan	Rp. 98.321.800	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawai	Makassar	Jumlah laporan administrasi kepegawai yang diadakan	1 laporan	Rp. 98.600.000		
c	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawai		Rp. 4.999.900	1 laporan	Rp. 4.999.900	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawai	Makassar	Jumlah laporan sistem informasi kepegawai	1 laporan	Rp. 5.000.000		
d	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		Rp. 99.793.600	1 laporan	Rp. 99.793.600	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Makassar	Jumlah laporan hasil evaluasi penilaian kinerja pegawai	1 laporan	Rp. 100.000.000		
e	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Rp. 218.750.000	100 orang	Rp. 218.750.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Makassar	Jumlah aparat SKPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 orang	Rp. 218.750.000		
f	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp. 99.704.700	100 orang	Rp. 99.704.700	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Jumlah sosialisasi peraturan Perundang-undangan	100 orang	Rp. 100.000.000		
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp. 2.918.788.800	100 %	Rp. 2.918.788.800	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Makassar	%" Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	Rp. 2.921.697.000		
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor		Rp. 240.000.000	26 unit	Rp. 240.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Makassar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	26 unit	Rp. 240.000.000		



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
b	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Rp. 814.550.000	300 unit	Rp. 814.550.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Makassar	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	300 unit	Rp. 815.450.000		
c	Penyediaan peralatan rumah tangga		Rp. 48.000.000	10 jenis	Rp. 48.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Makassar	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	10 jenis	Rp. 50.000.000		
d	Penyediaan bahan logistik kantor		Rp. 234.576.000	2 jenis	Rp. 234.576.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Makassar	Jumlah logistik yang tersedia	2 jenis	Rp. 234.576.000		
e	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Rp. 299.999.900	10 jenis	Rp. 299.999.900	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Makassar	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	Rp. 300.000.000		
f	Fasilitasi kunjungan tamu		Rp. 49.992.000	1 tahun	Rp. 49.992.000	Fasilitasi kunjungan tamu	Makassar	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 tahun	Rp. 50.000.000		
g	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Rp. 581.671.000	1 tahun	Rp. 581.671.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah perjalanan dinas	1 tahun	Rp. 581.671.000		
h	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp. 49.999.900	50 arsip	Rp. 49.999.900	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Jumlah arsip dinamis SKPD yang tertata	50 arsip	Rp. 50.000.000		
i	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		Rp. 600.000.000	3 sistem	Rp. 600.000.000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Makassar	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang tersedia	3 sistem	Rp. 600.000.000		
7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp. 3.099.100.000	100 %	Rp. 3.099.100.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makassar	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Rp. 3.100.000.000		
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp. 500.000.000	1 unit	Rp. 500.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan	1 unit	Rp. 500.000.000		
b	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp. 500.000.000	1 unit	Rp. 500.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah pengadaan kendaraan operasional dinas	1 unit	Rp. 500.000.000		
c	Pengadaan mebel		Rp. 449.100.100	60 unit	Rp. 449.100.100	Pengadaan mebel	Makassar	Jumlah lemari arsip yang tersedia	60 unit	Rp. 450.000.000		
				100 unit			Makassar	Jumlah meja kerja pejabat eselon/staf yang tersedia	100 unit			
				100 unit			Makassar	Jumlah kursi kerja pejabat eselon/staf yang tersedia	100 unit			
d	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya		Rp. 1.500.000.000	1 unit	Rp. 1.500.000.000	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	1 unit	Rp. 1.500.000.000		



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
e	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Rp. 100.000.000	8 unit	Rp. 100.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	8 unit	Rp. 100.000.000		
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Rp. 50.000.000	8 unit	Rp. 50.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	8 unit	Rp. 50.000.000		
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp. 6 12.373.243.97	100 %	Rp. 12.373.243.976	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makassar	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Rp. 12.373.600.252		
a	Penyediaan jasa surat menyurat		Rp. 4.992.000	1 tahun	Rp. 4.992.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Makassar	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	1 tahun	Rp. 5.000.000		
b	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		Rp. 829.619.256	1 tahun	Rp. 829.619.256	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Makassar	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	1 tahun	Rp. 829.636.248		
c	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Rp. 49.940.000	1 tahun	Rp. 49.940.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Makassar	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 tahun	Rp. 50.000.000		
d	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Rp. 0 11.488.692.72	369 orang	Rp. 11.488.692.720	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Makassar	Jumlah jasa tenaga non PNS	369 orang	Rp. 11.488.964.004		
9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp. 1.309.541.200	100 %	Rp. 1.309.541.200	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makassar	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100 %	Rp. 1.309.951.505		
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Rp. 79.999.200	1 unit	Rp. 79.999.200	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Makassar	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	1 unit	Rp. 80.000.000		
				1 unit			Makassar	Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	1 unit			
				1 unit			Makassar	'Jumlah pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan roda 4	1 unit			
b	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan		Rp. 754.762.000	43 unit	Rp. 754.762.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	Makassar	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	43 unit	Rp. 755.056.000		



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
dinas operasional atau lapangan				43 unit		dinas operasional atau lapangan	Makassar		43 unit			
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp. 30.000.000	10 unit	Rp. 30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	10 unit	Rp. 30.000.000		
d	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Rp. 20.000.000	5 unit	Rp. 20.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	5 unit	Rp. 20.000.000		
e	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Rp. 199.780.000	25 unit	Rp. 199.780.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Makassar	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25 unit	Rp. 199.895.505		
f	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Rp. 150.000.000	1 tahun	Rp. 150.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 tahun	Rp. 150.000.000		
g	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Rp. 75.000.000	1 tahun	Rp. 75.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 tahun	Rp. 75.000.000		
Total					Rp. 157.348.496.831	Total					Rp. 157.348.496.831	



2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditentukan dari prosesnya, diantaranya melalui pendekatan *bottom up* dimana perencanaan yang dilakukan dari penjaringan aspirasi masyarakat pemberi gagasan awal terkait kebutuhan nyata pada tingkat masyarakat dan penerima dampak kegiatan pembangunan yang direncanakan. Hasil penjaringan ini, dibahas secara berjenjang mulai dari murenbang desa, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten. Hasil penjaringan aspirasi kebutuhan suatu daerah yang menjadi kewenangan provinsi diusulkan melalui Rakortek provinsi sebagai media penyelarasan usulan berdasarkan kewenangan pengelolaan urusan masing-masing bidang pembangunan.

Adapun usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2022, sesuai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Pengelolaan Hutan Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Sub kegiatan Pengembangan Pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan/ata jasa lingkungan (Pengembangan Sarana dan prasarana pariwisata)	Desa Madello, Kec. Balusu, Kab. Barru	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi 1 lokasi	Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
2	Program Pengelolaan Hutan Kegiatan Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi Sub kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan		- Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pembahasan kerusakan hutan - Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	- 424 orang - 30 orang	



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	(Pembinaan penanganan perlindungan dan pengamanan hutan yaitu sosialisasi penanganan kebakaran hutan dan lahan)	- Wara timur, Kota Palopo - Mallusetasi, ujung, Kota Parepare - Bonto bahari, Kab. Bulukumba - Tanete Riattang, Kab. Bone		4 kegiatab	Disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah
	(Pembinaan penanganan perlindungan dan pengamanan hutan yaitu Sosialisasi penanganan perlindungan dan pengamanan hutan)	- Kota Palopo - Kota Parepare - Kab.Bulukumba - Kab. Bone		4 kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah
3	Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya Kegiatan Perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi Sub Kegiatan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau masuk dalam lampiran CITES		- Jumlah peserta sosialisasi tata cara perizinan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi - Jumlah laporan monitoring pengendalian dan pengawasan penangkar tumbuhan satwa liar yang tidak dilindungi	200 orang 1 laporan	
	(Pembinaan penanganan perlindungan dan pengamanan hutan yaitu sosialisasi tata cara perizinan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi)	- Wara Barat, Kota Palopo - Lapadde, Ujung, Kota Parepare - Bulukumpa, Kab. Bulukumba - Tanete Riattang Barat, Kab. Bone		4 kegiatan	Diterima dan mohon dilengkapi dengan proposal kegiatan
4	Program Pengelolaan Hutan Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan		- Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	12 kali	



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	<p>Pembinaan penanganan perlindungan dan pengamanan hutan sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengadaan baju pemadam kebakaran- Pengadaan tabung pemadam kebakaran- Pengadaan pompa apung pemadam kebakaran- Pengadaan lemari alat pemadam kebakaran	- Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah laporan titik api (hotspot) yang dipantau dan dikendalikan	16 laporan 4 paket	Diterima dan diproses melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, serta akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran daerah
5	<p>Program Pengelolaan Hutan</p> <p>Kegiatan Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi</p> <p>Sub kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan</p> <p>Pembinaan penanganan perlindungan dan pengamanan hutan</p>		<ul style="list-style-type: none">- Jumlah pelaksanaan patrol pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan- Jumlah papan bicara pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	768 kali patrol 5 unit/KPH 1 desa	
6	<p>Program Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan</p> <p>Kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan</p> <p>Sub kegiatan penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial</p>	Pongkeru, Malili, Kab. Luwu Timur	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah peserta sosialisasi/rapat koordinasi perhutanan sosial- Jumlah kelompok tani yang dikembangkan	100 orang 84 kelompok	Diterima dan akan dilakukan patrol pengamanan hutan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	Peningkatan kapasitas masyarakat	Dusun Malela, Margolembo, Mangkutana, Kab. Luwu Timur	usaha ekonomi produktif - jumlah kelompok perhutanan sosial yang dimonitoring dan dievaluasi - Jumlah peserta temu usaha KUPS - Jumlah laporan konflik tenurial PS yang difasilitasi penyelesaiannya - Jumlah produk KUPS yang dipromosikan	82 kelompok 100 orang 2 laporan 10 produk 150 orang	Diterima dan mohon lengkapi dengan proposal kegiatan
	Peningkatan pelestarian hutan dalam bentuk bantuan bibit murbei	- Desa Tottong, Kec. Donri-Donri, Kab. Soppeng - Desa Pasaka, Kec. Sabbangparu, Kab. Wajo		2 paket 2 paket	Diterima dan mohon lengkapi usulan kelompok dan dengan proposal kegiatan
	Peningkatan pelestarian hutan dalam bentuk : <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan bibit Aren KT. Pemuda Bangkit- Penyediaan bibit porang, KT. Sipaendeng- bantuan pengelolaan hasil hutan pengelolaan gula aren KTH. Tompobulu	- Kaballangan, Duampanua, Kab. Pinrang - Leoran, Enrekang, Kab. Enrekang - Desa Tompobulu, Kec. Balocci, Kab. Pangkep		10.000 phn 10.000 phn 1 paket	Diterima dan mohon lengkapi usulan kelompok dan dengan proposal kegiatan
7	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Sub Kegiatan Penerapan Teknik konservasi tanah dan air di wilayah DAS		- Jumlah unit dam penahan - Jumlah unit gully plug - Jumlah unit sumur resapan	34 unit 22 unit 80 unit	
	Peningkatan pelestarian hutan dalam bentuk pembangunan konservasi tanah dan air	- Lanna, Parangloe, Kab. Gowa - Timbuseng, Pattalassang, kab. Gowa - Jonjo, Parigi, Kab. Gowa		1 unit 10 unit 10 unit	Diterima dan mohon dilengkapi dengan usulan kegiatan/proposal dan rancangan teknis kegiatan melalui UPT. KPH



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		- Bonto Lerung, Tinggimoncong, Kab. Gowa		10 unit	

Sesuai tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa usulan kegiatan tersebut selaras dengan program dan kegiatan kehutanan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, dan menunjukkan bahwa perencanaan telah melalui proses partisipatif masyarakat atau dikenal dengan *bottom up*. Adapun usulan tersebut masih memerlukan data dukung diantaranya data teknis dan proposal usulan kegiatan. Data sukung tersebut merupakan bagian kelengkapan administrasi perencanaan tahun 2022 dan menjadi penting dikarenakan suatu perencanaan kegiatan membutuhkan data spasial, data sosial.

Dengan demikian usulan kegiatan diterima dengan beberapa catatan yaitu untuk melengkapi data dukung/proposal usulan kegiatan, dan juga akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Usulan



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan merupakan kondisi yang akan dicapai dalam RPJMD di Sulawesi Selatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020 - 2023 dalam bentuk pernyataan-pernyataan dalam mendukung pencapaian visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perwujudan pencapaian misi pembangunan. Sedangkan sasaran pembangunan adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan berupa hasil pembangunan daerah.

Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2023 merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasi secara terukur, spesifik dan dapat dicapai secara rasional dalam kurun waktu 3 tahun ke depan (2021-2023). Sasaran ini juga juga menampilkan sasaran pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 yang merupakan tahapan akhir dari pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan.

Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2018- 2023 berdasarkan Misi, dijabarkan sebagai berikut:

1. Penjabaran tujuan pada Misi 1 adalah: Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, dengan rumusan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
 - b. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penjabaran tujuan pada Misi 2 adalah: Meningkatkan Pemerataan infrastruktur wilayah, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah
3. Penjabaran tujuan pada Misi 3 adalah: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah
 - b. Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat



4. Penjabaran tujuan pada Misi 4 adalah: Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - c. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan
 - d. Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat.
5. Penjabaran tujuan pada Misi 5 terbagi atas 2 tujuan yaitu :
 - a. Meningkatkan produktivitas pertumbuhan nilai tambah produk unggulan daerah, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
 - a.1 Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah
 - b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan, dengan rumusan sasaran:
 - b. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

3.1.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

Rancangan Tema RKP tahun 2022 adalah **“Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif”**.

Untuk mewujudkan tema tersebut maka ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :



Sasaran pembangunan nasional tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan



manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata.

3.1.2.1 Arah kebijakan pembangunan wilayah tahun 2022

Arah kebijakan pengembangan wilayah tahun 2022 meliputi :

1. Mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19
2. Melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah,
3. Mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan
4. Meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah

Strategi Pengembangan Wilayah

1. Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti KEK, KI, KSPN, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi;
2. Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan Kawasan rawan bencana.

Sasaran Pengembangan Wilayah

1. Mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah,
2. Mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah

Sasaran utama pengembangan Wilayah Sulawesi pada tahun 2022 adalah (1) mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan; serta (3) memperluas kesempatan kerja. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi Covid-19, serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah. Adapun target pembangunan wilayah Sulawesi sesuai dengan Rancangan RKP 2022.



WILAYAH SULAWESI

Indikator	Target Tahun 2022					
	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat
Pertumbuhan Ekonomi (%)*	6,1-6,6	8,3-9,0	6,8-7,6	6,3-7,0	6,3-7,0	5,8-6,5
Tingkat Kemiskinan (%)	7,51	12,34	8,38	10,84	14,76	10,25
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,18-6,47	3,44-2,70	6,15-5,43	4,33-3,49	4,12-3,38	3,13-2,39

3.1.2.2 Arah kebijakan Pengembangan wilayah Sulawesi tahun 2022

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang yang mengacu pada rencana umum tata ruang yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) beserta rencana rincinya yaitu Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Arah kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi mengarah pada :

1. Peningkatan produktivitas unggulan

Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (tanaman pangan kelautan dan perikanan, serta pertambangan) untuk mendukung peran Sulawesi sebagai lumbung pangan nasional.

2. Penerapan SPM dan pelayanan dasar

Melakukan pemerataan akses dan mutu layanan dasar melalui percepatan penerapan SPM

3. Kapasitas kelembagaan daerah

Meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah.

4. Pembangunan kawasan, investasi, dan kepastian hukum

Mendorong KEK/KI dan kawasan pariwisata unggulan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan pelayanan perizinan investasi melalui kepastian hukum. dan mengembangkan kawasan perkotaan dan mengoptimalkan tata kelola dan kelembagaan pengelola kawasan metropolitan

5. Kawasan, ekonomi local dan infrastruktur

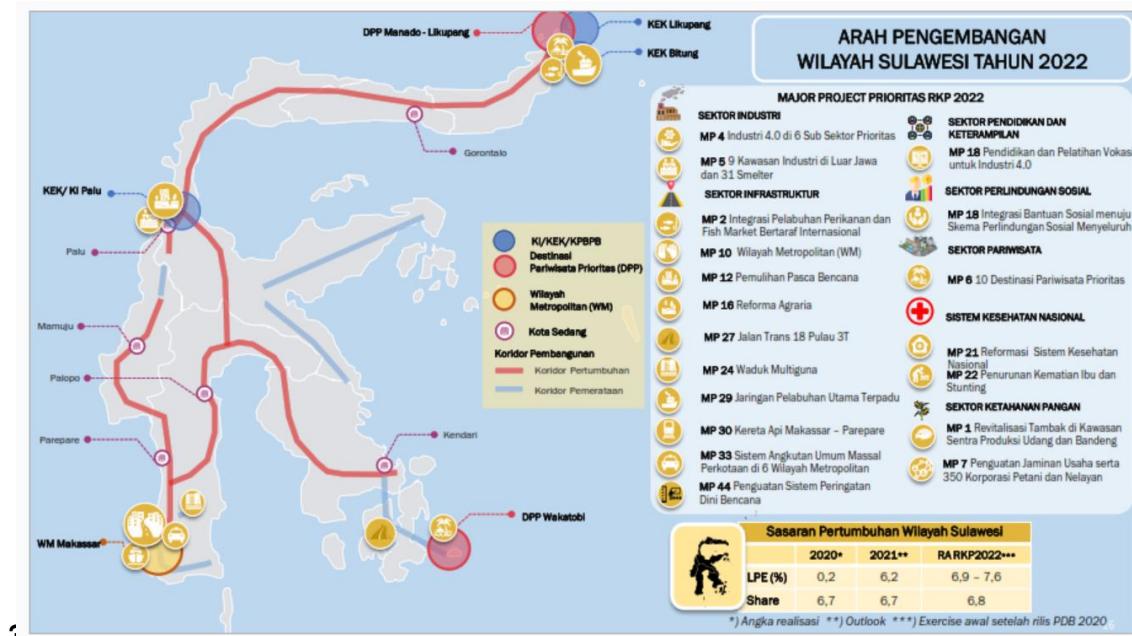
Memperkuat peran Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia melalui pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah



6. Pengelolaan lingkungan dan resiko bencana

Melakukan upaya pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi bencana, serta mengoptimalkan pemulihan kembali pasca bencana.

Gambaran integrasi pembangunan wilayah Sulawesi Selatan dalam kerangka pembangunan wilayah Pulau Sulawesi digambarkan dalam peta pengembangan wilayah sebagai berikut :



Terkait pembangunan sektor kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Adapun sasaran strategis kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :



1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjadinya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Target sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022, disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 6****Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022**

IKU	Sasaran Strategis dan Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja tahun 2022
Sasaran 1 : Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,22
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	%	17,22
3	Penurunan Laju Deforestasi	Juta ha	0,38
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	65
5	Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya	Ribu ha	230
6	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (<i>High Conservation Values</i>)	Juta ha	10,30
Sasaran 2 : Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan			
7	Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional	Rp trilyun	109
8	Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting	US \$ Milyar	14
9	Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK	Rp trilyun	5,3
Sasaran 3 : Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan			
10	Luas Kawasan hutan dengan Status Penetapan	Juta ha	10
11	Luas Kawasan hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria)	Ribu ha	600
12	Luas Kawasan hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	Ha	1.250.000
Sasaran 4 : Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing			
13	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan	Poin	2,3
14	Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum	Kasus	2.567
15	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,60

3.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang yang dijabarkan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan



RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah

Prioritas tahun 2022 banyak dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupti pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Sulawesi selatan juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2022.

Tahun 2022 masih difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2022 yaitu:

“ Pemulihan Ekonomi melalui penguatan inovasi daerah dan pemantapan hilirisasi pengolahan berbasis Sumber daya alam”

Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pemantapan reformasi birokrasi
2. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan
3. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan social
4. Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya
5. Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup

Penetapan sasaran pembangunan dari prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 merupakan upaya dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah tahun 2022, tersaji pada tabel berikut :



Tabel 7
Target Kinerja Utama Daerah Tahun 2022

Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Target	Target	
						2021	2022	
Misi 1	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif							
	Tujuan 1	Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik		1. Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/ angka	B (70,00)	BB (71 – 80)	
		Sasaran 1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2. Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ angka	BB (>70-80)	BB (>70-80)	
Misi 2	Tujuan 2	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public		3. Indeks Pelayanan Publik	Huruf/ angka	B (3,51 – 4)	A (>80 – 90)	
		Sasaran 2				(3,51 – 4)	(4,01 – 4,50)	
		Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel						
Misi 3	Tujuan 3	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah		4. Indeks Williamson	Angka	0,62	0,61	
		Sasaran 3	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5. Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	78,73	81,69	
Misi 4	Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif							
	Tujuan 4	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata		6. PDRB Perkapita AHB	Rp. Juta	56,69	59,32	
		Sasaran 4	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	7. Tingkat Kemiskinan	%	12,19	9,8	
Misi 5	Tujuan 5	Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat		8. Tingkat Pengangguran terbuka	%	8,18	7,2	
		Sasaran 5		9. Rasio Gini	Angka	0,414	0,414	
		Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter						
Misi 6	Tujuan 6	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter		10. IPM	Angka	71,93	72,27	
		Sasaran 6	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	11. Indeks Pendidikan	Angka	65,29	65,87	
		Sasaran 7	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	12. Indeks Kesehatan	Angka	77,8	77,76	
		Sasaran 8	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	13. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	74,78	75,21	
		Sasaran 9	Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat			24,845	24,709	
Misi 7	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan							
	Tujuan 5	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah		15. Pertumbuhan ekonomi	%	(-0,89) – 1,59	4,10 – 5,55	
		Sasaran 10	Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	16. Produktifitas Total Daerah	Rp/Angkatan Kerja	78.879.345	84.745.947	
	Tujuan 6	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan		17. IKLH	poin	76,79	77,78	
		Sasaran 11	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	18. Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)	Juta Ton CO ₂ Eq	0,96	1,07	
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah							75	



Adapun arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 8
Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022

Prioritas Pembangunan		Sasaran		Arah Kebijakan
1	Pemantapan reformasi birokrasi	1	Memantapkan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Pelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas
		2	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	
2	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	3	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur	Pemenuhan kebutuhan energi listrik dan energi terbarukan
				Peningkatan kualitas dan kemantapan jalan provinsi serta pembangunan infrastruktur wilayah terisolir
				Penyediaan akses air minum dan sanitasi kawasan permukiman
3	Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan social	4	Meningkatnya kesejahteraan dan Produktifitas masyarakat	Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana-prasarana, teknologi, dan mikro finance pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru
			5	Menurunnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah
4	Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudi	6	Meningkatnya derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan moralitas dan karakter peserta didik dan tenaga kependidikan menengah dengan merancang dan menerapkan integrasi nilai-nilai moral dan karakter dalam proses belajar mengajar
				Akselerasi pembangunan rumah sakit regional
				Pengembangan daya saing keolahragaan melalui dukungan sarana dan prasarana olahraga
5	Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup	8	Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Mendorong kesalehan dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dengan membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai keagamaan
				Peningkatan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman
				Pemberdayaan Lembaga keagamaan, pesantren, penyelenggarana keagamaan
6	Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudi	7	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dalam dunia usaha dan lembaga masyarakat
7	Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup	8	Meningkatnya produktifitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumber daya alam	Peningkatan produktivitas melalui industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan
			9	Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar daerah aliran sungai (DAS)
8	Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup	9	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam penegakan hukum terhadap pemanfaatan jasa lingkungan dan



Prioritas Pembangunan		Sasaran		Arah Kebijakan
				ketaatan pelaksanaan pembangunan rendah karbon

3.2.1 Sasaran Pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mendukung pencapaian RPJMD tahun 2018-2023 pada :

Tabel 9
Keterkaitan RPJMD dan Renstra

RPJMD					Renstra
Misi	Tujuan	Sasaran		Tujuan Dinas	
3	Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif	3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata	5	Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat
5	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan	5	Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	10	Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah
		11	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	11	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan kepada Visi, Misi dan Tujuan RPJMD, prioritas isu-isu strategis, serta memperhatikan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat. Tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan **“Mengoptimalkan Pengelolaan Kawasan Hutan”**

Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 10
Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dan 2022

Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja tahun 2021	Target Kinerja tahun 2022
1	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Persen	75	75
		1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	75	75
				Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	Persen	90	90
				Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	Persen	90	90
				Persentase Temuan	Persen	5	2



Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja tahun 2021	Target Kinerja tahun 2022
				Material			
2	Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan			Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Kewenangan Provinsi	Ha	1.780.029	1.780.029
		2	Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	58,64	58,66
		3	Meningkatnya Kontribusi Kehutanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Percentase Kontribusi PDRB Kehutanan terhadap PDRB Sulsel	Per센	0,07	0,07
				Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	Ha	12.000	12.000
		4	Meningkatnya Akses Legal Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan baik laki-laki maupun perempuan melalui Perhutanan Sosial dan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati	Percentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi	Per센	6,77	7,89
				Percentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata	Per센	10	15
		5	Terjaganya Fungsi dan Legalitas Kawasan Hutan	Percentase Luas kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	Per센	64,67	64,67
				Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	KPH	24	24

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 mencakup 5 (lima) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 93 (Sembilan puluh tiga) sub kegiatan. Program dan kegiatan disusun untuk pencapaian visi, misi Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang pada RPJMD tahun 2018-2023.

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Hutan, terdiri atas kegiatan
 - a. Kegiatan pengelolaan rencana tata hutan KPH kewenangan provinsi, dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan rancangan bangun tata hutan wilayah KPH
 - Pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPH
 - Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana operasionalisasi KPH



- Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
- b. Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
- c. Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung
 - Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan/atau Jasa Lingkungan
- d. Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara, dengan sub kegiatan :
 - Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan
 - Pembangunan Hutan Rakyat diluar Kawasan Hutan Negara
 - Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
 - Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan.
 - Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara
- e. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dengan sub kegiatan :
 - Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan
 - Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan kebakaran Hutan dan lahan
- f. Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dengan sub kegiatan:
 - Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati
 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya



- Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu
- g. Kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 m³ per tahun, dengan sub kegiatan :
- Rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun
 - Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 m³ per tahun
- h. Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan, dengan sub kegiatan :
- Penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/ atau bibit terdaftar
 - Sertifikasi sumber benih
 - Sertifikasi mutu benih
 - Sertifikasi mutu bibit
 - Pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit
2. Program konservasi sumberdaya alam dan ekosistem, dengan kegiatan :
- a. Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
 - Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES
3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, dengan kegiatan :
- a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, dengan sub kegiatan :
 - Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluhan kehutanan dan SDM bidang kehutanan
 - Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial
4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dengan kegiatan :
- a. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS
 - Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS
 - Penerapan teknik konservasi tanah dan air di wilayah DAS
 - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
 - Pengembangan Kelembagaan pengelolaan DAS



- Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS
5. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dengan kegiatan :
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - b. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
 - Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD
 - Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
 - c. Kegiatan Administarsi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
 - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Perencanaan pengelolaan retribusi daerah
 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
 - Pengolahan Data Retribusi Daerah
 - Pelaporan pengelolaan retribusi daerah
 - e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan ;
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya



- Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
 - Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
- g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan mebel
 - Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
 - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan



- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

Program dan kegiatan tersebut diatas, merupakan program dan kegiatan yang juga mendukung program kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di kabupaten/kota. Terdapat 16 unit KPH sebagai UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki tugas fungsi perencanaan, pelayanan teknis pengelolaan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pagu indikatif program dan kegiatan tahun 2022, akan bersumber dari dana APBD, DAK Penugasan dan DBH.



Tabel 11

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Dan perkiraan maju Tahun 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan**

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Kehutanan								
	Kehutanan								
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi		61,60 %	Rp. 21.882.302.550			65,47 %	Rp. 9.024.330.000
		Percentase kerusakan hutan		16,20 %				14,82 %	
		Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan		92.336,62 m ³				92.336,62 m ³	
		Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu		283 ton				283 ton	
	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan KPH Kewenangan Provinsi	Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya		1.780.029 ha	Rp. 729.429.900			1.780.029 ha	Rp. 730.000.000
	Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah KPH	Jumlah dokumen rancang bangun KPH	Makassar	4 dokumen	Rp. 100.000.000	APBD I		4 dokumen	Rp. 100.000.000
	Pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPH	Jumlah patok batas blok dan petak	Sulsel	748 buah	Rp. 300.000.000	APBD I		748 km	Rp. 300.000.000
		Panjang penataan batas blok dan petak	Sulsel	150 km				150 km	
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah jenis sarana prasarana operasionalisasi KPH	Sulsel	3 jenis	Rp. 79.430.000	APBD I		3 jenis	Rp. 80.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Luas Wilayah yang diusulkan untuk perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Sulsel	500 ha	Rp. 249.999.900	APBD I		500 ha	Rp. 250.000.000
	Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPH)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan KPH		24 dokumen	Rp. 1.500.000.000			24 dokumen	Rp. 1.500.000.000
	Penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP KPH	Makassar	7 dokumen	Rp. 1.500.000.000	APBD I		8 dokumen	Rp. 1.500.000.000
		Jumlah dokumen RPHJPd	Makassar	16 dokumen				24 dokumen	
	Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan		Rp. 25.000.000	Rp. 654.873.600			Rp. 25.000.000	Rp. 305.120.000
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan produksi	Sulsel	110.425,79 ha	Rp. 74.873.600	APBD I		120.425,79 ha	Rp. 75.120.000
		Jumlah izin wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan produksi	Sulsel	60 izin				60 izin	



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah produksi HHBK di kawasan hutan produksi	Sulsel	3.041,94 ton				3.041,94 ton	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Lokasi Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan lindung	Sulsel	16 lokasi	Rp. 80.000.000	APBD I		16 lokasi	Rp. 80.000.000
		Jumlah Lokasi wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan lindung	Sulsel	16 lokasi				16 lokasi	
		Jumlah Lokasi produksi HHBK di kawasan hutan lindung	Sulsel	16 lokasi				16 lokasi	
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	Sulsel	1 lokasi	Rp. 500.000.000	APBD I		1 lokasi	Rp. 150.000.000
	Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	Luas rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara		1.571 ha	Rp. 15.757.378.750			1.571 ha	Rp. 3.246.104.500
	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah lokasi sumber benih unggul yang dikembangkan	Sulsel	5 lokasi	Rp. 99.913.500	APBD I		5 lokasi	Rp. 100.000.000
		Jumlah unit persemaian	Sulsel	4 lokasi	Rp. 600.000.000			4 lokasi	
	Pembangunan Hutan Rakyat diluar Kawasan Hutan Negara	Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	Sulsel	233 ha	Rp. 2.328.083.000	APBD I /DAK		233 ha	Rp. 1.720.536.000
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	Sulsel	233 ha				233 ha	
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Yang Disusun.	Makassar	1 dokumen	Rp. 49.994.200	APBD I		1 dokumen	Rp. 50.000.000
	Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan.	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan atau pengawasan rehabilitasi lahan	Sulsel	30 kali	Rp. 185.132.200	APBD I		30 kali	Rp. 185.260.000
		Jumlah pelaksanaan pendampingan dan bimbingan teknis	Sulsel	15 kali				15 kali	
	Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara	Luas lahan penghijauan lingkungan diluar kawasan hutan negara	Sulsel	10 ha	Rp. 12.494.255.850	APBD I		10 ha	Rp. 60.000.000
	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Percentase Jumlah Kasus Kerusakan Kawasan hutan yang tertangani		100 %	Rp. 2.508.186.000			100 %	Rp. 2.508.976.000
	Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Sulsel	424 orang	Rp. 799.819.200	APBD I		424 orang	Rp. 799.836.000
		Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	Sulsel	30 orang				30 orang	
	Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Sulsel	768 kali patrol (48 kali/KPH)	Rp. 1.370.880.000	APBD I		768 kali patrol (48 kali/KPH)	Rp. 1.370.880.000
		Jumlah papan bicara pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Sulsel	5 unit/KPH				5 unit/KPH	



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring perlindungan hutan	Sulsel	288 kali	Rp. 238.449.200	APBD I		288 kali	Rp. 238.630.000
		Jumlah lokasi pelaksanaan operasi gabungan penanganan tindak pidana khusus kehutanan	Sulsel	1 lokasi				1 lokasi	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan kebakaran Hutan dan lahan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	Sulsel	12 kali	Rp. 99.037.600	APBD I		12 kali	Rp. 99.630.000
		Jumlah laporan titik api (hot spot) yang dipantau dan dikendalikan	Sulsel	16 laporan				16 laporan	
	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jenis HHBK yang diolah oleh pemegang izin		3 jenis	Rp. 227.469.900			3 jenis	Rp. 227.500.000
	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah Produksi HHBK yang diolah oleh pemegang izin	Sulsel	49.187,134 ton	Rp. 75.000.000	APBD I		49.187,134 ton	Rp. 75.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah komitmen izin fasilitasi penerbitan IUIPHHBK	Makassar	5 izin	Rp. 2.470.000	APBD I		5 izin	Rp. 2.500.000
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas areal budidaya HHBK	Sulsel	100 ha	Rp. 75.000.000	APBD I		100 ha	Rp. 75.000.000
	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah pemegang IUIPHHBK yang diawasi	Sulsel	5 izin	Rp. 74.999.900	APBD I		5 izin	Rp. 75.000.000
	Kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun	Jumlah data dan informasi nilai ekspor hasil hutan kayu		28.155,1717 ton	Rp. 154.945.600			28.155,1717 ton	Rp. 155.170.000
	Rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/tahun	Jumlah industri yang aktif dan tertib aturan	Sulsel	60 industri	Rp. 74.986.400	APBD I		60 industri	Rp. 75.000.000
		Jumlah data produksi kayu olahan	Sulsel	3 laporan				3 laporan	
		Jumlah data asal usul rencana pemenuhan bahan baku	Sulsel	16 laporan				16 laporan	
	Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun	Jumlah data sebaran GANIS PHPL yang melaksanakan PUHH pada industry	Sulsel	40 orang	Rp. 79.959.200	APBD I		40 orang	Rp. 80.170.000
		Jumlah data pemasaran hasil hutan kayu 86ndus dan ekspor	Sulsel	24 laporan				24 laporan	
		Jumlah 86ndustry yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi	Sulsel	60 industri				60 industri	
	Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit tanaman hutan		95 pemohon	Rp. 350.018.800			95 pemohon	Rp. 351.460.000
	Penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/ atau bibit terdaftar	Jumlah pemohon pengadaan benih dan pengedar benih/bibit tanaman hutan terdaftar	Sulsel	36 pemohon	Rp. 99.431.200	APBD I		36 pemohon	Rp. 100.000.000
		Jumlah calon sumber benih yang diidentifikasi	Sulsel	15 lokasi				15 lokasi	



Kode		Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Sertifikasi sumber benih	Jumlah pemohon sertifikasi sumber benih	Sulsel	30 pemohon	Rp. 50.239.800	APBD I		30 pemohon	Rp. 50.340.000
		Sertifikasi mutu benih	Jumlah pemohon sertifikasi mutu benih	Sulsel	15 pemohon	Rp. 50.261.800	APBD I		15 pemohon	Rp. 50.340.000
		Sertifikasi mutu bibit	Jumlah pemohon sertifikasi mutu bibit	Sulsel	50 pemohon	Rp. 49.641.800	APBD I		50 pemohon	Rp. 50.000.000
		Pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit	Jumlah lokasi pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit tanaman hutan	Sulsel	24 kab/kota	Rp. 100.444.200	APBD I		24 kab/kota	Rp. 100.780.000
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata		2 jenis	Rp. 393.757.800			2 jenis	Rp. 393.758.000
		Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade in Endangered species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi		100 penangkar	Rp. 393.757.800			100 penangkar	Rp. 393.758.000
		Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Jumlah peserta sosialisasi tata cara perizinan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Sulsel	200 orang	Rp. 393.757.800	APBD I		200 orang	Rp. 393.758.000
			Jumlah laporan monitoring pengendalian dan pengawasan penangkar tumbuhan satwa liar yang tidak dilindungi	Makassar	1 laporan				1 laporan	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Percentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan		16,25 %	Rp. 8.400.072.000			16,76 %	Rp. 13.431.917.000
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya		60 sdm	Rp. 8.400.072.000			60 sdm	Rp. 13.431.917.000
			Jumlah masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang meningkatkan kapasitasnya		1.000 orang (50 KTH)				1.000 orang (50 KTH)	
			Jumlah usaha perhutanan sosial yang ditingkatkan		50 KTH				50 KTH	
			Jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan		350 KTH				350 KTH	
		Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluhan kehutanan dan SDM bidang kehutanan	Jumlah penyuluhan kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	Sulsel	100 orang	Rp. 199.970.600	APBD I		100 orang	Rp. 200.000.000
			Jumlah SDM Kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	Sulsel	200 orang				200 orang	



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah unit penyelenggara penyuluhan yang dimonitoring dan dievaluasi	Sulsel	16 unit penyelenggara				16 unit penyelenggara	
	Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan	Jumlah KTH yang naik kelas kemampuan	Sulsel	2 KTH	Rp. 199.999.900	APBD I		2 KTH	Rp. 200.000.000
		Jumlah kelompok tani/orang yang mengikuti lomba wana lestari dan kalpataru	Sulsel	7 klp/orang				7 klp/orang	
		Jumlah pembentukan dan pengembangan wana wiwata widyakarya	Sulsel	1 kelompok				1 kelompok	
	Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	Jumlah peserta sosialisasi/ Rapat Koordinasi perhutanan sosial	Sulsel	100 orang	Rp. 8.000.101.500	APBD I /DAK		100 orang	Rp. 13.031.917.000
		Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	Sulsel	84 kelompok tani/KTH				84 kelompok tani/KTH	
		Jumlah kelompok perhutanan sosial yang dimonitoring dan dievaluasi	Sulsel	82 kelompok				82 kelompok	
		Jumlah peserta temu usaha KUPS	Sulsel	100 orang				100 orang	
		Jumlah laporan konflik tenurial PS yang difasilitasi penyelesaiannya	Sulsel	2 laporan				2 laporan	
		Jumlah produk KUPS yang dipromosikan	Sulsel	10 produk				10 produk	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang direhabilitasi		2 DAS	Rp. 2.721.453.132			2 DAS	Rp. 2.725.940.000
	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola di Provinsi Sulawesi Selatan	Sulsel	2 DAS	Rp. 2.721.453.132			2 DAS	Rp. 2.725.940.000
	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	Sulsel	2 dokumen	Rp. 75.000.000	APBD I		2 dokumen	Rp. 75.000.000
	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Jumlah DAS yang dioptimalisasikan fungsi dan daya dukungnya	Sulsel	2 DAS	Rp. 98.466.663	APBD I		2 DAS	Rp. 100.000.000
	Penerapan teknik konservasi tanah dan air di wilayah DAS	Jumlah unit dam penahan	Sulsel	34 unit	Rp. 2.100.861.669	APBD I /DAK		34 unit	Rp. 2.103.815.000
		Jumlah unit gully plug	Sulsel	22 unit				22 unit	
		Jumlah unit sumur resapan	Sulsel	80 unit				80 unit	
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah masyarakat dan pihak terkait yang hadir dan berpartisipasi pada kegiatan penanaman	Sulsel	250 orang	Rp. 100.000.000	APBD I		250 orang	Rp. 100.000.000
	Pengembangan Kelembagaan pengelolaan DAS	Jumlah pertemuan rapat yang dilaksanakan	Sulsel	4 kali	Rp. 99.999.800	APBD I		4 kali	Rp. 100.000.000
	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	Sulsel	1 tahun	Rp. 247.125.000	APBD I		1 tahun	Rp. 247.125.000
		Jumlah pertemuan atau rapat yang dilaksanakan	Sulsel	4 kali				4 kali	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah		100 %	Rp. 123.950.911.349			100 %	Rp. 134.876.740.692,46



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Percentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik		100 %				100 %	
		Percentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)		100 %				100 %	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Makassar	100 %	Rp. 1.348.259.200	APBD I		100 %	Rp.1.348.564.951,46
	Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah	Makassar	2 dokumen	Rp. 787.501.600	APBD I		2 dokumen	Rp. 787.506.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Makassar	1 dokumen	Rp. 95.128.600	APBD I		1 dokumen	Rp. 95.240.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Makassar	1 dokumen	Rp. 79.903.600	APBD I		1 dokumen	Rp. 80.000.000
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Makassar	1 dokumen	Rp. 95.188.400	APBD I		1 dokumen	Rp. 95.240.000
	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Makassar	1 dokumen	Rp. 79.973.600	APBD I		1 dokumen	Rp. 80.000.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Makassar	2 dokumen	Rp. 99.999.800	APBD I		2 dokumen	Rp. 100.000.000
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Makassar	2 dokumen	Rp. 110.563.600	APBD I		2 dokumen	Rp. 110.578.951,46
		Jumlah laporan data dan informasi yang dikumpulkan dan dipublikasikan	Makassar	2 laporan				2 laporan	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusuan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu		100 %	Rp. 101.243.436.973			100 %	Rp. 112.147.622.984
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji, tunjangan dan TPP	Makassar	843 orang	Rp. 100.920.248.773	APBD I		843 orang	Rp.111.793.652.984
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah aparat SKPD yang dikelola administrasi kepegawaiannya	Makassar	843 orang	Rp. 4.999.000	APBD I		843 orang	Rp. 5.000.000
		Jumlah administrasi yang disusun	Makassar	1 laporan				1 laporan	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	Makassar	50 dokumen	Rp. 5.000.000	APBD I		50 dokumen	Rp. 5.000.000
	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah pelaporan pelaksanaan akuntansi SKPD	Makassar	2 laporan	Rp. 10.000.000	APBD I		2 laporan	Rp. 10.000.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Makassar	1 laporan	Rp. 116.108.800	APBD I		1 laporan	Rp. 146.155.000
	Pengelolaan dan penyipahan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Makassar	1 laporan	Rp. 42.373.800	APBD I		1 laporan	Rp. 42.940.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Jumlah pelaporan keuangan yang tersusun	Makassar	18 laporan	Rp. 142.220.600	APBD I		18 laporan	Rp. 142.375.000
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis yang tersusun	Makassar	2 laporan	Rp. 2.486.000	APBD I		2 laporan	Rp. 2.500.000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyusuan dokumen laporan barang milik daerah		2 dokumen	Rp. 59.642.100			2 dokumen	Rp. 60.000.000



Kode		Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan penilaian barang milik daerah SKPD	Makassar	1 dokumen	Rp. 49.694.200	APBD I		1 dokumen	Rp. 50.000.000
		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penyusunan barang milik daerah SKPD	Makassar	1 dokumen	Rp. 4.999.900	APBD I		1 dokumen	Rp. 5.000.000
		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Makassar	1 dokumen	Rp. 4.948.000	APBD I		1 dokumen	Rp. 5.000.000
		Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)		Rp. 1.712.430.000	Rp. 268.444.100			Rp. 1.712.430.000	Rp. 268.530.000
		Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Makassar	1 laporan	Rp. 5.000.000	APBD I		1 laporan	Rp. 5.000.000
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kebijakan retribusi daerah yang disebarluaskan	Makassar	1 laporan	Rp. 116.073.600	APBD I		1 laporan	Rp. 116.155.000
		Pendaatan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan objek retribusi daerah	Makassar	1 laporan	Rp. 142.370.900	APBD I		1 laporan	Rp. 142.375.000
		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan data retribusi daerah	Makassar	1 laporan	Rp. 2.499.800	APBD I		1 laporan	Rp. 2.500.000
		Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Makassar	1 laporan	Rp. 2.499.800	APBD I		1 laporan	Rp. 2.500.000
		Kegiatan Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN		90	Rp. 1.330.455.000			90	Rp. 1.331.350.000
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	Makassar	809 orang	Rp. 808.885.000	APBD I		809 orang	Rp. 809.000.000
			Jumlah pakaian lapangan yang diadakan	Makassar	399 orang				399 orang	
			Jumlah pakaian korpri yang diadakan	Makassar	809 orang				809 orang	
			Jumlah pakaian batik khas daerah yang diadakan	Makassar	809 orang				809 orang	
			Jumlah pakaian olahraga dan perlengkapannya yang diadakan	Makassar	809 orang				809 orang	
		Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaiian	Jumlah laporan administrasi kepegawaiian yang diadakan	Makassar	1 laporan	Rp. 98.321.800	APBD I		1 laporan	Rp. 98.600.000
		Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaiian	Jumlah laporan sistem informasi kepegawaiian	Makassar	1 laporan	Rp. 4.999.900	APBD I		1 laporan	Rp. 5.000.000
		Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah laporan hasil evaluasi penilaian kinerja pegawai	Makassar	1 laporan	Rp. 99.793.600	APBD I		1 laporan	Rp. 100.000.000
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparat SKPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Makassar	100 orang	Rp. 218.750.000	APBD I		100 orang	Rp. 218.750.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan Perundang-undangan	Makassar	100 orang	Rp. 99.704.700	APBD I		100 orang	Rp. 100.000.000
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor		100 %	Rp. 2.918.788.800			100 %	Rp. 2.921.697.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Makassar	26 unit	Rp. 240.000.000	APBD I		26 unit	Rp. 240.000.000
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Makassar	300 unit	Rp. 814.550.000	APBD I		300 unit	Rp. 815.450.000



Kode		Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Makassar	10 jenis	Rp. 48.000.000	APBD I		10 jenis	Rp. 50.000.000
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah logistik yang tersedia	Makassar	2 jenis	Rp. 234.576.000	APBD I		2 jenis	Rp. 250.000.000
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Makassar	10 jenis	Rp. 299.999.900	APBD I		10 jenis	Rp. 300.000.000
		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	Makassar	1 tahun	Rp. 49.992.000	APBD I		1 tahun	Rp. 50.000.000
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	Makassar	1 tahun	Rp. 581.671.000	APBD I		1 tahun	Rp. 581.671.000
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis SKPD yang tertata	Makassar	50 arsip	Rp. 49.999.900	APBD I		50 arsip	Rp. 50.000.000
		Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang tersedia	Makassar	3 sistem	Rp. 600.000.000	APBD I		3 sistem	Rp. 600.000.000
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	Rp. 3.099.100.000			100 %	Rp. 3.100.000.000
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan	Makassar	1 unit	Rp. 500.000.000	APBD I		1 unit	Rp. 500.000.000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan operasional dinas	Makassar	1 unit	Rp. 500.000.000	APBD I		1 unit	Rp. 500.000.000
		Pengadaan mebel	Jumlah lemari arsip yang tersedia	Makassar	60 unit	Rp. 449.100.100	APBD I		60 unit	Rp. 450.000.000
			Jumlah meja kerja pejabat eselon/staf yang tersedia	Makassar	100 unit				100 unit	
			Jumlah kursi kerja pejabat eselon/staf yang tersedia	Makassar	100 unit				100 unit	
		Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Makassar	1 unit	Rp. 1.500.000.000	APBD I		1 unit	Rp. 1.500.000.000
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	8 unit	Rp. 100.000.000	APBD I		8 unit	Rp. 100.000.000
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	8 unit	Rp. 50.000.000	APBD I		8 unit	Rp. 50.000.000
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	Rp. 12.373.243.976			100 %	Rp. 12.373.600.252
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	Makassar	1 tahun	Rp. 4.992.000	APBD I		1 tahun	Rp. 5.000.000
		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	Makassar	1 tahun	Rp. 829.619.256	APBD I		1 tahun	Rp. 829.636.248
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Makassar	1 tahun	Rp. 49.940.000	APBD I		1 tahun	Rp. 50.000.000
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga non PNS	Makassar	369 orang	Rp. 11.488.692.720	APBD I		369 orang	Rp. 11.488.964.004
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik		100 %	Rp. 1.309.541.200			100 %	Rp. 1.309.951.505



Kode		Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	Makassar	1 unit	Rp. 79.999.200	APBD I		1 unit	Rp. 80.000.000
			Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	Makassar	1 unit				1 unit	
			'Jumlah pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan roda 4	Makassar	1 unit				1 unit	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Makassar	43 unit	Rp. 754.762.000	APBD I		43 unit	Rp. 755.056.000
			Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Makassar	43 unit				43 unit	
			Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4	Makassar	39 unit				39 unit	
			Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 2	Makassar	382 unit				382 unit	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	Makassar	10 unit	Rp. 30.000.000	APBD I		10 unit	Rp. 30.000.000
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Makassar	5 unit	Rp. 20.000.000	APBD I		5 unit	Rp. 20.000.000
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Makassar	25 unit	Rp. 199.780.000	APBD I		25 unit	Rp. 199.895.505
		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Makassar	1 tahun	Rp. 150.000.000	APBD I		1 tahun	Rp. 150.000.000
		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Makassar	1 tahun	Rp. 75.000.000	APBD I		1 tahun	Rp. 75.000.000
TOTAL						Rp. 157.348.496.831				Rp. 160.452.685.692,46



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 memuat program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian sasaran Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022, serta mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kehutanan.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2022 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat prioritas perangkat daerah yang mendukung prioritas provinsi dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran 5 (lima) *menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat*, sasaran 10 (sepuluh) *meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah* dan sasaran 11 (sebelas) *terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pembangunan* yang tertuang pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD tahun 2018-2023.

Prioritas pembangunan provinsi pada tahun 2022 pada sektor kehutanan adalah peningkatan kualitas lahan dan sekaligus berfungsi estetika. Sasaran lokasi kegiatan tersebut yaitu Mapongka yang berada di Kabupaten Tana Toraja. Kegiatan tersebut berupa penanaman bambu dan pembuatan tanaman hutan rakyat. Selain itu juga yang menjadi prioritas provinsi adalah pembangunan wisata alam berupa pengembangan wisata alam pinus yang berada di Bulu Tana Kabupaten Bone.

Rencana kerja program dan kegiatan prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang mendukung prioritas provinsi tahun 2022, sebagai berikut :



Tabel 12

Prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang mendukung prioritas provinsi tahun 2022

RPJMD			Kode		Program / Kegiatan / Sub kegiatan		Indikator kinerja program/kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Misi	Tujuan	Sasaran							
3	Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif	3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata	5	Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	16,25 %	Rp. 8.400.072.000
						Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	60 sdm	Rp. 8.400.072.000
							Jumlah masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang meningkatkan kapasitasnya	1.000 orang (50 KTH)	
							Jumlah usaha perhutanan sosial yang ditingkatkan	50 KTH	
							Jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	350 KTH	
						Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluhan kehutanan dan SDM bidang kehutanan	Jumlah penyuluhan kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	100 orang	Rp. 199.970.600
							Jumlah SDM Kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	200 orang	
							Jumlah unit penyelenggara penyuluhan yang dimonitoring dan dievaluasi	16 unit penyelenggara	
						Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan	Jumlah KTH yang naik kelas kemampuan	2 KTH	Rp. 199.999.900
							Jumlah kelompok tani/orang yang mengikuti lomba wana lestari dan kalpataru	7 klp/orang	
							Jumlah pembentukan dan pengembangan wana wiwata widyakarya	1 kelompok	
						Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	Jumlah peserta sosialisasi/ Rapat Koordinasi perhutanan sosial	100 orang	Rp. 8.000.101.500
							Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	84 kelompok tani/KTH	
							Jumlah kelompok perhutanan sosial yang dimonitoring dan dievaluasi	82 kelompok	
							Jumlah peserta temu usaha KUPS	100 orang	



RPJMD					Kode		Program / Kegiatan / S3ub kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Misi	Tujuan		Sasaran							
								Jumlah laporan konflik tenurial PS yang difasilitasi penyelesaiannya	2 laporan	
								Jumlah produk KUPS yang dipromosikan	10 produk	
5	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan	5	Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	10	Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor tambah produk unggulan daerah		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi	61,60 %	Rp. 21.882.302.550
								Percentase kerusakan hutan	16,20 %	
								Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	92.336,62 m ³	
								Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	283 ton	
							Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan KPH Kewenangan Provinsi	Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	1.780.029 ha	Rp. 729.429.900
							Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah KPH	Jumlah dokumen rancang bangun KPH	4 dokumen	Rp. 100.000.000
							Pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPH	Jumlah patok batas blok dan petak	748 buah	Rp. 300.000.000
								Panjang penataan batas blok dan petak	150 km	
							Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah jenis sarana prasarana operasionalisasi KPH	3 jenis	Rp. 79.430.000
							Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Luas Wilayah yang diusulkan untuk perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	500 ha	Rp. 249.999.900
							Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	24 dokumen	Rp. 1.500.000.000
							Penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP KPH	7 dokumen	Rp. 1.500.000.000
								Jumlah dokumen RPHJPd	16 dokumen	
							Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan	Rp. 25.000.000	Rp. 654.873.600
							Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan produksi	110.425,79 ha	Rp. 74.873.600
								Jumlah izin wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan produksi	60 izin	



RPJMD			Kode		Program / Kegiatan / S3ub kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Misi	Tujuan	Sasaran						
					Jumlah produksi HHBK di kawasan hutan produksi	3.041,94 ton		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Lokasi Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan lindung	16 lokasi	Rp. 80.000.000
						Jumlah Lokasi wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan lindung	16 lokasi	
						Jumlah Lokasi produksi HHBK di kawasan hutan lindung	16 lokasi	
					Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	Rp. 500.000.000
					Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	Luas rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara	1.571 ha	Rp. 15.757.378.750
					Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah lokasi sumber benih unggul yang dikembangkan	5 lokasi	Rp. 99.913.500
						Jumlah unit persemaian	4 lokasi	Rp. 600.000.000
					Pembangunan Hutan Rakyat diluar Kawasan Hutan Negara	Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	233 ha	Rp. 2.328.083.000
						Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	233 ha	
					Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Yang Disusun.	1 dokumen	Rp. 49.994.200
					Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan.	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan atau pengawasan rehabilitasi lahan	30 kali	Rp. 185.132.200
						Jumlah pelaksanaan pendampingan dan bimbingan teknis	15 kali	
					Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara	Luas lahan penghijauan lingkungan diluar kawasan hutan negara	10 ha	Rp. 12.494.255.850
					Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Jumlah Kasus Kerusakan Kawasan hutan yang tertangani	100 %	Rp. 2.508.186.000
					Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	424 orang	Rp. 799.819.200
						Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	30 orang	
					Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	768 kali patroli (48 kali/KPH)	Rp. 1.370.880.000
						Jumlah papan bicara pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	5 unit/KPH	
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring perlindungan hutan	288 kali	Rp. 238.449.200



RPJMD			Kode		Program / Kegiatan / S3ub kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Misi	Tujuan	Sasaran						
					Jumlah lokasi pelaksanaan operasi gabungan penanganan tindak pidana khusus kehutanan	1 lokasi		
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan kebakaran Hutan dan lahan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	12 kali	Rp. 99.037.600
					Jumlah laporan titik api (hot spot) yang dipantau dan dikendalikan	16 laporan		
					Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jenis HHBK yang diolah oleh pemegang izin	3 jenis	Rp. 227.469.900
					Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah Produksi HHBK yang diolah oleh pemegang izin	49.187,134 ton	Rp. 75.000.000
					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah komitmen izin fasilitasi penerbitan IUIPHHBK	5 izin	Rp. 2.470.000
					Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas areal budidaya HHBK	100 ha	Rp. 75.000.000
					Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah pemegang IUIPHHBK yang diawasi	5 izin	Rp. 74.999.900
					Kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun	Jumlah data dan informasi nilai ekspor hasil hutan kayu	28.155,1717 ton	Rp. 154.945.600
					Rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/tahun	Jumlah industri yang aktif dan tertib aturan	60 industri	Rp. 74.986.400
						Jumlah data produksi kayu olahan	3 laporan	
						Jumlah data asal usul rencana pemenuhan bahan baku	16 laporan	
					Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun	Jumlah data sebaran GANIS PHPL yang melaksanakan PUHH pada industry	40 orang	Rp. 79.959.200
						Jumlah data pemasaran hasil hutan kayu 97ndus dan ekspor	24 laporan	
						Jumlah 97ndus yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi	60 industri	
					Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit tanaman hutan	95 pemohon	Rp. 350.018.800
					Penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/ atau bibit terdaftar	Jumlah pemohon pengada benih dan pengedar benih/bibit tanaman hutan terdaftar	36 pemohon	Rp. 99.431.200
					Sertifikasi sumber benih	Jumlah calon sumber benih yang diidentifikasi	15 lokasi	
						Jumlah pemohon sertifikasi sumber benih	30 pemohon	Rp. 50.239.800



RPJMD				Kode		Program / Kegiatan / S3ub kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
Misi	Tujuan	Sasaran									
						Sertifikasi mutu benih	Jumlah pemohon sertifikasi mutu benih	15 pemohon	Rp. 50.261.800		
						Sertifikasi mutu bibit	Jumlah pemohon sertifikasi mutu bibit	50 pemohon	Rp. 49.641.800		
						Pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit	Jumlah lokasi pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit tanaman hutan	24 kab/kota	Rp. 100.444.200		
	11	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	11	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang direhabilitasi	2 DAS	Rp. 2.721.453.132	
							Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola di Provinsi Sulawesi Selatan	2 DAS	Rp. 2.721.453.132	
							Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	2 dokumen	Rp. 75.000.000	
							Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Jumlah DAS yang dioptimalisasikan fungsi dan daya dukungnya	2 DAS	Rp. 98.466.663	
							Penerapan teknik konservasi tanah dan air di wilayah DAS	Jumlah unit dam penahan	34 unit	Rp. 2.100.861.669	
								Jumlah unit gully plug	22 unit		
								Jumlah unit sumur resapan	80 unit		
							Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah masyarakat dan pihak terkait yang hadir dan berpartisipasi pada kegiatan penanaman	250 orang	Rp. 100.000.000	
							Pengembangan Kelembagaan pengelolaan DAS	Jumlah pertemuan rapat yang dilaksanakan	4 kali	Rp. 99.999.800	
							Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	1 tahun	Rp. 247.125.000	
								Jumlah pertemuan atau rapat yang dilaksanakan	4 kali		



4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 13

Program dan kegiatan prioritas perangkat daerah tahun 2022

Kode		Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	2 jenis	Rp. 393.757.800
		Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	100 penangkar	Rp. 393.757.800
		Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Jumlah peserta sosialisasi tata cara perizinan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	200 orang	Rp. 393.757.800
			Jumlah laporan monitoring pengendalian dan pengawasan penangkar tumbuhan satwa liar yang tidak dilindungi	1 laporan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %	
			Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 %	
			Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)	100 %	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	Rp. 1.348.259.200
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah	2 dokumen	Rp. 787.501.600
		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	Rp. 95.128.600
		Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	Rp. 79.903.600
		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	Rp. 95.188.400
		Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	Rp. 79.973.600
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	2 dokumen	Rp. 99.999.800
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	Rp. 110.563.600
			Jumlah laporan data dan informasi yang dikumpulkan dan dipublikasikan	2 laporan	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	Rp. 101.243.436.973
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji, tunjangan dan TPP	843 orang	Rp. 100.920.248.773
		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah aparat SKPD yang dikelola administrasi kepegawaiannya	843 orang	Rp. 4.999.000
			Jumlah administrasi yang disusun	1 laporan	
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	50 dokumen	Rp. 5.000.000



Kode					Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif
					Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah pelaporan pelaksanaan akuntansi SKPD	2 laporan	Rp. 10.000.000
					Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	Rp. 116.108.800
					Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	1 laporan	Rp. 42.373.800
					Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Jumlah pelaporan keuangan yang tersusun	18 laporan	Rp. 142.220.600
					Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis yang tersusun	2 laporan	Rp. 2.486.000
					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyusuan dokumen laporan barang milik daerah	2 dokumen	Rp. 59.642.100
					Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan penilaian barang milik daerah SKPD	1 dokumen	Rp. 49.694.200
					Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penyusunan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	Rp. 4.999.900
					Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	Rp. 4.948.000
					Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	Rp. 1.712.430.000	Rp. 268.444.100
					Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan perencanaan pengelolaan retribusi daerah	1 laporan	Rp. 5.000.000
					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kebijakan retribusi daerah yang disebarluaskan	1 laporan	Rp. 116.073.600
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan objek retribusi daerah	1 laporan	Rp. 142.370.900
					Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan data retribusi daerah	1 laporan	Rp. 2.499.800
					Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	1 laporan	Rp. 2.499.800
					Kegiatan Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penialian Kinerja ASN	90	Rp. 1.330.455.000
					Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	809 orang	Rp. 808.885.000
						Jumlah pakaian lapangan yang diadakan	399 orang	
						Jumlah pakaian korpri yang diadakan	809 orang	
						Jumlah pakaian batik khas daerah yang diadakan	809 orang	
						Jumlah pakaian olahraga dan perlengkapannya yang diadakan	809 orang	
					Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawai	Jumlah laporan administrasi kepegawai yang diadakan	1 laporan	Rp. 98.321.800
					Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawai	Jumlah laporan sistem informasi kepegawai	1 laporan	Rp. 4.999.900
					Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah laporan hasil evaluasi penilaian kinerja pegawai	1 laporan	Rp. 99.793.600
					Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparat SKPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 orang	Rp. 218.750.000
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan Perundang-undangan	100 orang	Rp. 99.704.700
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%" Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	Rp. 2.918.788.800
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	26 unit	Rp. 240.000.000
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	300 unit	Rp. 814.550.000
					Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	10 jenis	Rp. 48.000.000
					Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah logistik yang tersedia	2 jenis	Rp. 234.576.000
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	Rp. 299.999.900
					Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 tahun	Rp. 49.992.000
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	1 tahun	Rp. 581.671.000
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis SKPD yang tertata	50 arsip	Rp. 49.999.900



Kode					Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif
					Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang tersedia	3 sistem	Rp. 600.000.000
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Rp. 3.099.100.000
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan	1 unit	Rp. 500.000.000
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan operasional dinas	1 unit	Rp. 500.000.000
					Pengadaan mebel	Jumlah lemari arsip yang tersedia	60 unit	Rp. 449.100.100
						Jumlah meja kerja pejabat eselon/staf yang tersedia	100 unit	
						Jumlah kursi kerja pejabat eselon/staf yang tersedia	100 unit	
					Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	1 unit	Rp. 1.500.000.000
					Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	8 unit	Rp. 100.000.000
					Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	8 unit	Rp. 50.000.000
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Rp. 12.373.243.976
					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	1 tahun	Rp. 4.992.000
					Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	1 tahun	Rp. 829.619.256
					Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 tahun	Rp. 49.940.000
					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga non PNS	369 orang	Rp. 11.488.692.720
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100 %	Rp. 1.309.541.200
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	1 unit	Rp. 79.999.200
						Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	1 unit	
						Jumlah pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan roda 4	1 unit	
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	43 unit	Rp. 754.762.000
						Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	43 unit	
						Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4	39 unit	
						Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 2	382 unit	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	10 unit	Rp. 30.000.000
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang di pelihara	5 unit	Rp. 20.000.000
					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25 unit	Rp. 199.780.000
					Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 tahun	Rp. 150.000.000
					Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 tahun	Rp. 75.000.000





BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada sasaran kinerja dan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Rencana kerja tersebut menunjukkan kesesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022

- a. Pengendalian pelaksanaan pembangunan kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022.
- b. Penilaian akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah dan target kinerja sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022.

Untuk itu, dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tersebut, dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen penganggaran sesuai dokumen perencanaan agar tercipta konsistensi dokumen
2. Melaksanakan rencana kerja tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
3. Melakukan pengendalian dan pemantauan rencana kerja secara periodik (triwulan, semester)

5.2 Rencana tindak lanjut.

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022, menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (RKA dan DPA tahun 2022) dengan mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022.



Selain itu rencana kerja 2022 menjadi pedoman dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan.